



**STATISTIK
POLITIK
DAN
KEAMANAN**
PROVINSI JAWA TENGAH
2018





**STATISTIK
POLITIK
DAN
KEAMANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2018**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018

ISBN : 978-602-5419-35-5
No. Publikasi : 33520.1915
Katalog BPS : 4601001.33
Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 71 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Dinamika politik sedikit banyak memberi pengaruh pada kondisi keamanan, dimana stabilitas keduanya dibutuhkan dalam proses pembangunan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik mempengaruhi keamanan dan di waktu lain keamanan mempengaruhi politik.

Perkembangan politik dan keamanan yang dinamis tersebut memerlukan alat untuk memonitor maupun mengevaluasi. Karena itu diperlukan adanya data statistik yang bisa memotret dinamika politik dan keamanan. Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018 ini merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 yang bersumber dari dinas/instansi terkait. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data akan lebih memahami informasi yang disajikan.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data secara cepat dan mudah. Pada sisi lainnya informasi tersebut akan memudahkan para pengambil kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menyusun perencanaan, dan memonitor serta mengevaluasi. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Sentot Bangun Widoyono, MA

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Politik	3
1.1.2 Keamanan	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	6
2.3.1 Statistik Politik	6
2.3.2 Statistik Keamanan	10
BAB III. PENDUDUK DAN PARTISIPASI BERPOLITIK	13
3.1 Penduduk	13
3.2 Pemilihan Kepala Daerah	15

	Halaman
BAB IV. LEMBAGA DEMOKRASI	23
4.1 Partai Politik	24
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	25
4.2.1 Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	25
4.2.2 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota	26
4.3 Organisasi Masyarakat	28
4.4 Peraturan Daerah	29
 BAB V. KEAMANAN	 31
5.1 Indikator Utama Kejahatan	31
5.2 Kejadian Kejahatan Menurut Jenisnya	34
LAMPIRAN	35
DAFTAR PUSTAKA	69
REFERENSI INTERNET	71

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2018	37
Tabel 2	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/- Kota	38
Tabel 3	Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 Menurut Kabupaten/Kota	39
Tabel 4	Jumlah Pemilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota	40
Tabel 5	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota	41
Tabel 6	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota	42
Tabel 7	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 Menurut Kabupaten/Kota	43
Tabel 8	Jumlah Suara Sah dan Perolehan Suara Pasangan Terpilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 Menurut Kabupaten/Kota	44

Tabel 9	Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Jawa Tengah, Periode Pemilihan 2015-2018	45
Tabel 10	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Jawa Tengah, Periode Pemilihan 2015-2018	46
Tabel 11	Jumlah Kandidat, Perolehan Suara dan Partai Pengusung Pada Pilkada Terakhir di Jawa Tengah	47
Tabel 12	Kepala Daerah Terpilih Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Usia Saat Dilantik, Jabatan Sebelumnya dan Tanggal Pelantikan	48
Tabel 13	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Asal Partai, 2018	49
Tabel 14	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin, 2018	52
Tabel 15	Jumlah Total Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018	53
Tabel 16	Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang Dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018	54
Tabel 17	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang Dihasilkan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018	55

Tabel 18	Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2018	56
Tabel 19	Jumlah Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018	57
Tabel 20	Banyaknya Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2016 – 2018	59
Tabel 21	Banyaknya Tindak Pidana yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/Kota, 2016 – 2018	60
Tabel 22	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018	61

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018	14
Gambar 3.2 Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 2018	17
Gambar 3.3 Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Jawa Tengah Periode Pemilihan 2015 – 2018	18
Gambar 3.4 Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih dalam Pilkada Kabupaten/Kota, Periode Pemilihan 2015 - 2018	20
Gambar 3.5 Persentase Bupati/Walikota Terpilih Menurut Jenis Kelamin, Periode 2015 - 2018	21
Gambar 3.6 Persentase Bupati/Walikota Terpilih Menurut Pendidikan, Periode 2015 - 2018	22
Gambar 4.1 Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	25
Gambar 4.2 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin, 2018	26
Gambar 4.3 Persentase Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018	27
Gambar 4.4 Jumlah Total Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018 ...	29

	Halaman
Gambar 4.5 Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang Dihasilkan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2016 – 2018	30
Gambar 5.1 Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan, 2017 – 2018	32
Gambar 5.2 Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018	33
Gambar 5.3 Persentase Kejadian Kejahatan Menurut Jenisnya di Jawa Tengah, 2018	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan/potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam realita politik Indonesia. Distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral di tangan presiden menjadi tuntutan orde reformasi. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Good Government and Clean Governance*).

Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM. Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Keberhasilan reformasi di bidang penegakan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Suatu kemustahilan bila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan terhadap munculnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Hal ini tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." . Salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini, yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global, dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak pada tumbuhnya ekspektasi harapan masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan/monitoring dan evaluasi. Ini artinya diperlukan alat untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan, karena itu diperlukan adanya data statistik yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan indikator untuk memantau dan memonitor serta mengevaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah

dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan yang hasilnya dituangkan melalui publikasi. Output dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Bagi pemerintah, informasi ini setidaknya dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

1.1.1 Politik

Perkembangan politik merupakan sebuah kondisi yang mencakup seluruh ruang lingkup ilmu politik yang tumbuh, berkembang, atau mengalami kemunduran pada satu dekade kepemimpinan. Perkembangan politik di Indonesia sebagai bagian dari kehidupan sosial-politik secara umum mengalami pasang surut. Perkembangan politik sebagai salah satu tujuan berpolitik, menjadi bagian dari pengertian-pengertian yang dibuat maupun sikap-sikap yang berkembang untuk mewujudkan politik sebagai bagian dari kualitas suatu bangsa. Politik juga menjadi acuan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bertransformasi pada capaian sistem yang baik, dan terjaminnya suatu pemerintahan yang baik.

1.1.2 Keamanan

Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat pada status keamanan di suatu wilayah. Permasalahan yang ditimbulkan dari mulai masalah hukum, keamanan dan ketertiban juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, menuntut para pelaksana di bidang ini untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan

keamanan secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dirinci menurut Kabupaten/Kota.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Nara sumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instansi provinsi sebagai nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan instansi kabupaten/kota yang menjadi nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota, Polres/Polresta di kabupaten/kota, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan administrasi instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kompilasi data dari instansi yang menjadi nara sumber. Selanjutnya data yang sudah masuk dari kabupaten/kota serta data yang dikompilasi di tingkat provinsi diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam

lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018 ini.

2.3 Konsep dan Definisi

2.3.1 Statistik Politik

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Otonomi daerah	Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Daerah otonom	Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

(selanjutnya disebut daerah)	dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Desentralisasi	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Pemilihan Umum (Pemilu)	Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).
Pemilu DPR, DPD dan DPRD	Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).
Penduduk	Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Warga Negara Indonesia	Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Pemilih	Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Peserta Pemilu	Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
Partai Politik Peserta Pemilu	<p>Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:</p> <p>1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan,:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik; • Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; • Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; • Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; • Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per

	<p>seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan • Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. <p>2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.</p>
Golongan putih (Golput)	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
Partisipasi Penduduk dalam Pemilu	Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

2.3.2 Statistik Keamanan

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran	Perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia
Peristiwa yang dilaporkan	Setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian	<ul style="list-style-type: none">❖ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.❖ Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.❖ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas <i>Plichtmatigheid</i>.❖ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.❖ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.❖ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.
Kerugian	Hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/-pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban Kejahatan

Seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan

<https://jateng.bps.go.id>

<https://jateng.bps.go.id>

BAB III

PENDUDUK DAN PARTISIPASI BERPOLITIK

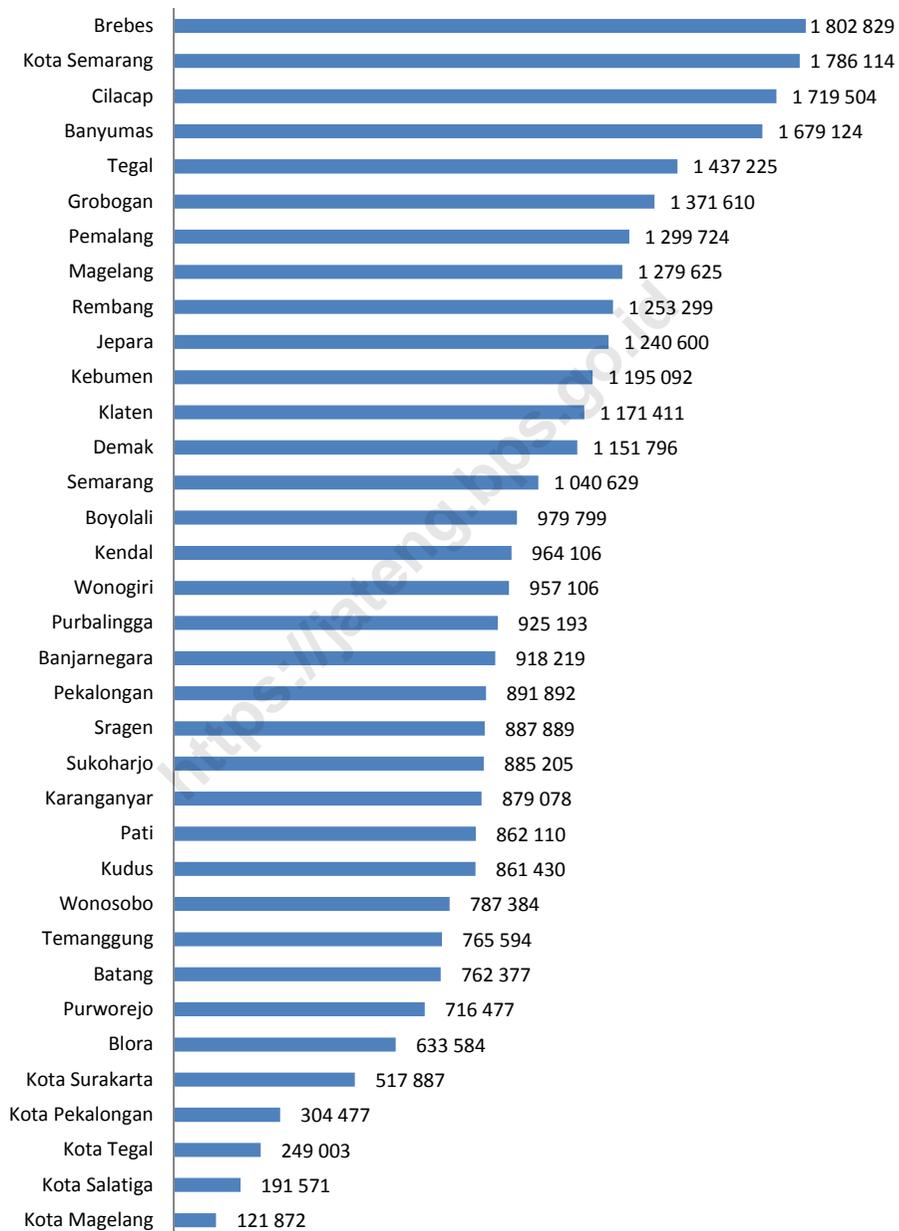
3.1 Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, sedangkan dalam bidang keamanan, semakin banyak penduduk semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.544,12 km², secara administratif terbagi menjadi 35 Kabupaten/Kota, yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Cilacap dengan luas 2.138,51 km², disusul Kabupaten Wonogiri dengan luas 1.822,37 km² dan Kabupaten Grobogan dengan luas 1.795,85 km². Sebaliknya, tiga kota dengan luas terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 18,12 km², Kota Tegal dengan luas 34,49 km², dan Kota Surakarta dengan luas 44,03 km². (Lampiran Tabel 1).

Dari luasan wilayah tersebut, pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah dihuni sekitar 34,490 juta jiwa. Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 1,803 juta jiwa. Sebaliknya Kota Magelang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 122 ribu jiwa. (Lampiran Tabel 1). Dengan melihat luas wilayah serta besaran jumlah penduduk, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya dalam memenangkan pemilu, sebab rakyat memegang kedaulatan secara penuh. Suara rakyat yang disalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sangat menentukan.

Gambar 3.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah, 2018



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk SP2010, BPS Provinsi Jawa Tengah

3.2 Pemilihan Kepala Daerah

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12).

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamankan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung telah mulai dilakukan sejak Juni 2005 dan pelaksanaannya pada setiap kabupaten/kota tidak dilakukan serentak. Namun demikian sejak 2015 dilakukan pemilihan serentak. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Setelah itu, undang-undang ini pun mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pelaksanaan Pilkada Serentak berangkat dari evaluasi pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Ada tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya Pilkada Serentak, yakni menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif, memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya, dan menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme (*Perludem – Jurnal Pemilu & Demokrasi April 2016 “Evaluasi Pilkada Serentak 2015”*).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilihan, sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala secara serentak untuk seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2027, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala secara serentak dilaksanakan berdasarkan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kesenjangan pelaksanaan ini bukan saja berkaitan dengan hari dan tanggal pemungutan suara tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses tahapan penyelenggaraan.

Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pilkada serentak gelombang pertama ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan Januari s/d Juni 2016. Pilkada Serentak dilaksanakan di 269 daerah yang terdiri atas 9 Provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Artinya, sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pilkada serentak pertama di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 4 kota dan 17 kabupaten.

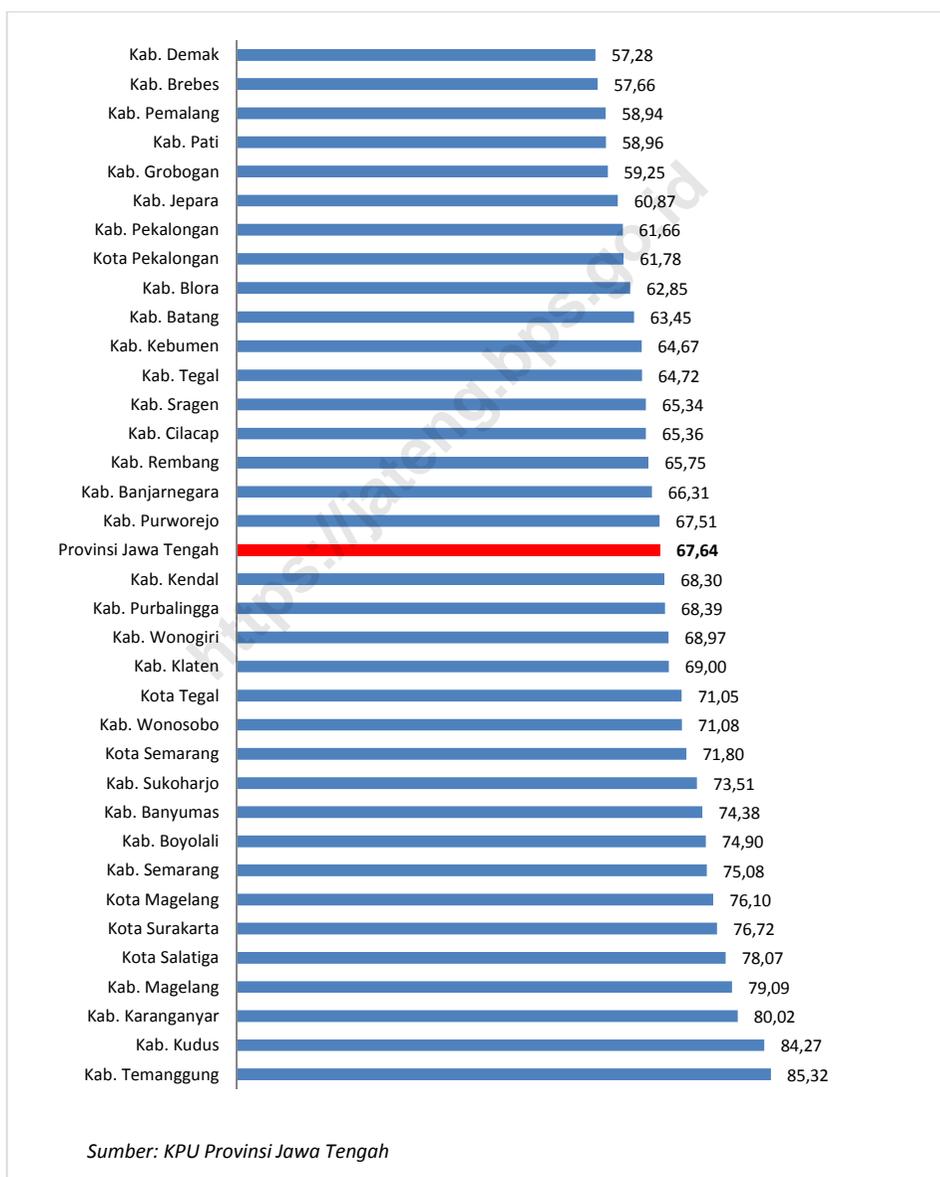
Pilkada serentak kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017. Pilkada serentak ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) Juli s/d Desember 2016 dan 2017. Pilkada serentak ini dilaksanakan di 101 daerah yang terdiri atas 7 Provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, pilkada serentak kedua dilaksanakan di 6 kabupaten dan 1 kota.

Pilkada serentak ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) 2018 dan 2019. Secara nasional, terdapat 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2018 yang terdiri atas 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Tengah selain memilih gubernur dan wakil gubernur, juga dilaksanakan di 6 kabupaten dan 1 kota untuk memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

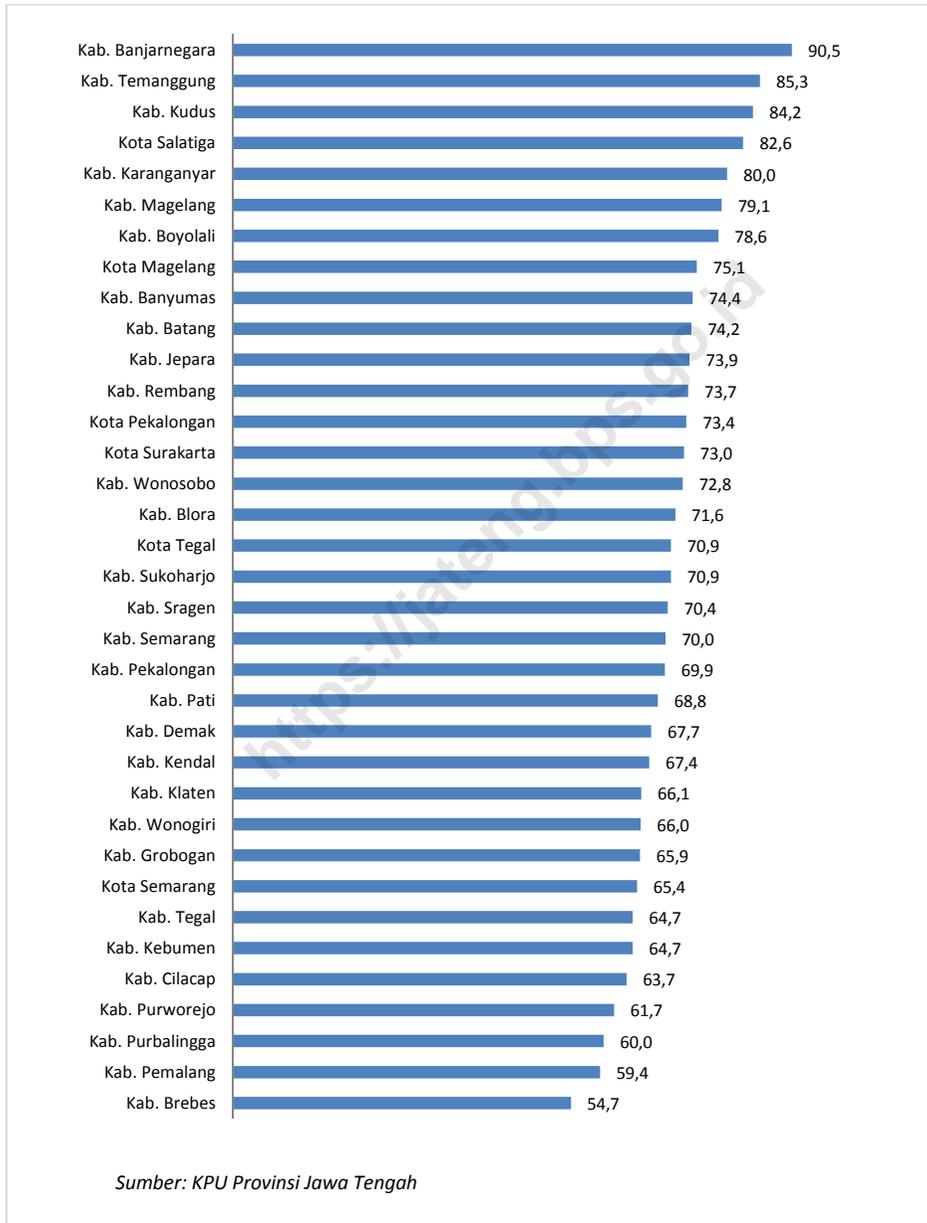
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk pada pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 67,64 persen, Tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi berada di Kabupaten Temanggung mencapai 85,32 persen. Namun demikian masih banyak penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tersebut, tercatat bahwa sekitar 57,28 persen

pemilih di Kabupaten Demak yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. (Lampiran Tabel 3).

Gambar 3.2
Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 2018



Gambar 3.3
Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota
dan Wakil Bupati/Walikota Terakhir di Jawa Tengah
Periode Pemilihan 2015- 2018



Berbeda halnya pada pelaksanaan Pilkada Bupati/Walikota di masing-masing kabupaten/kota. Partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Bupati di Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 tercatat mencapai 90,5 persen, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih terendah selama pelaksanaan Pilkada Bupati serentak selama tahun 2015-2018 terjadi di Kabupaten Brebes, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 54,7 persen. (Lampiran Tabel 9).

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada perlu dicari penyebabnya, apakah dikarenakan:

1. kurangnya sosialisasi pelaksanaan pilkada sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya memberikan suara saat pemilu,
2. masyarakat yang memang kurang responsif terhadap pelaksanaan pilkada,
3. data pemilih yang bermasalah.

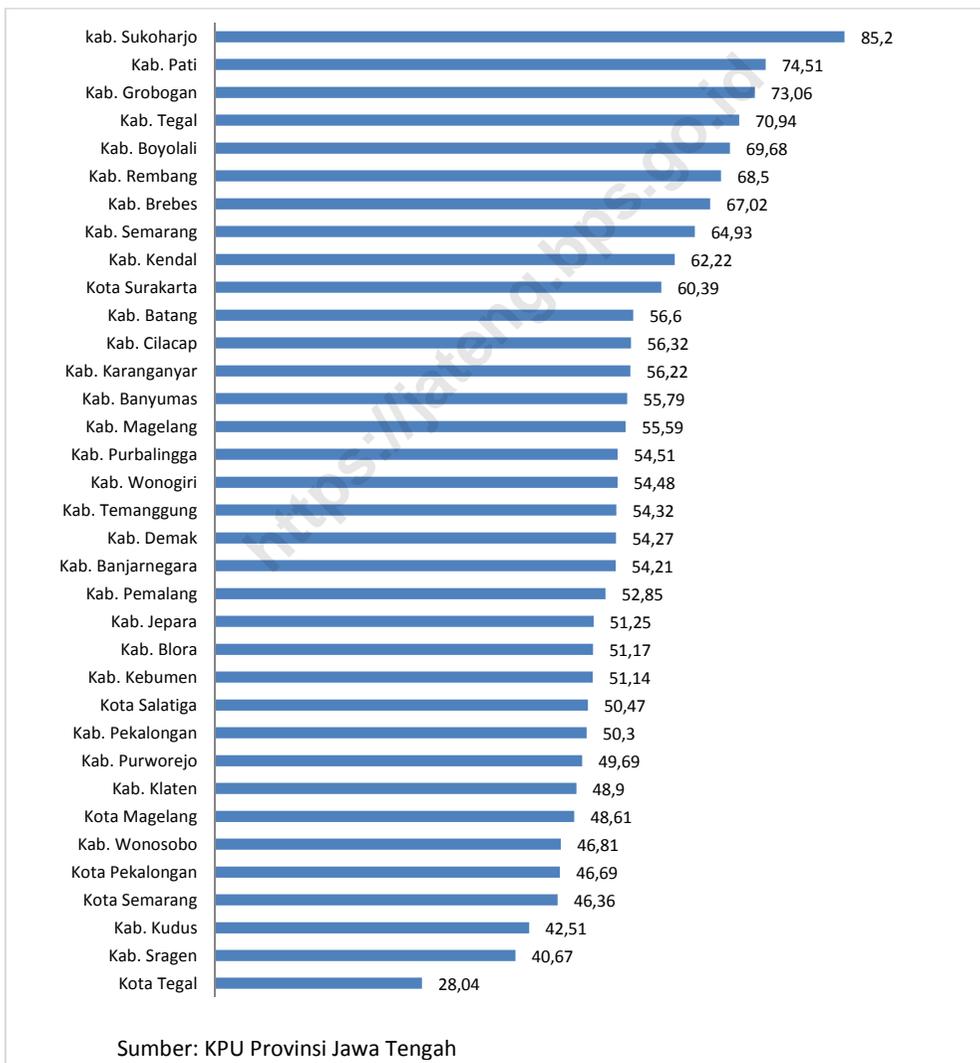
Pada daerah-daerah dimana masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pilkada dengan menggunakan hak pilihnya, perlu melakukan terobosan agar pelaksanaan Pilkada selanjutnya bisa lebih sukses. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Selain itu dibutuhkan pula profesionalisme panitia penyelenggara pemilihan umum.

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pilkada akan menentukan kemenangan pasangan calon gubernur/bupati/walikota. Besaran dukungan suara masyarakat sebagai penentu kemenangan dalam pilkada dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon gubernur/bupati/walikota.

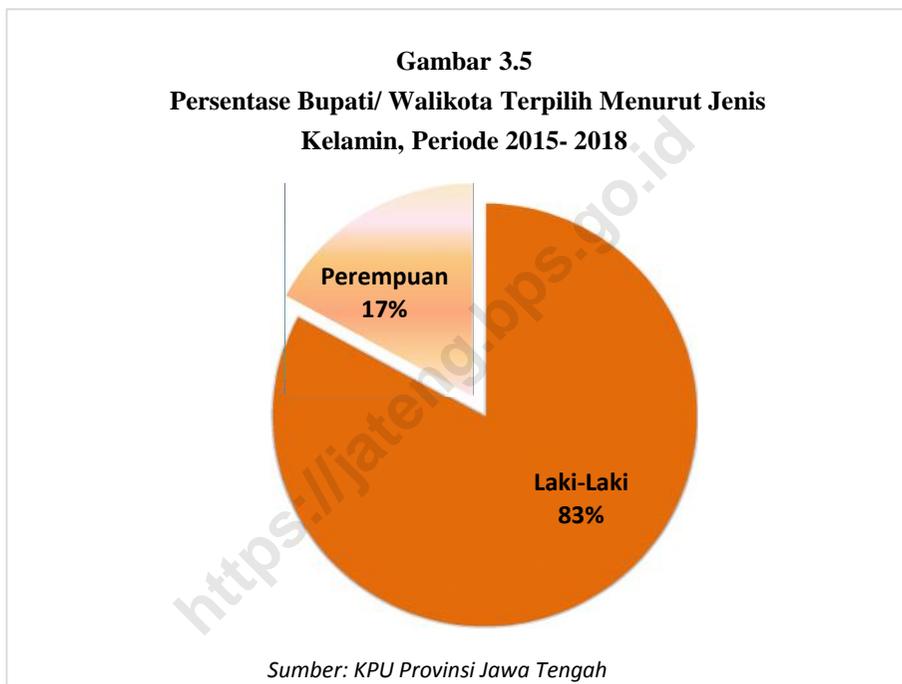
Besaran jumlah perolehan suara antar kabupaten/kota tentunya akan sangat tergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan yang menggunakan hak pilihnya serta banyaknya kandidat yang ikut dalam bursa pemilihan calon gubernur/bupati/walikota. Jika dilihat dari besaran jumlah suara pasangan yang terpilih dalam pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak pada pilkada

bupati/walikota adalah pasangan terpilih pada pilkada di Kabupaten Sukoharjo pada saat pilkada bupati serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015. Pada pilkada yang diikuti oleh dua kandidat pasangan calon bupati/wakil bupati tersebut jumlah suara terbanyak yang diperoleh pasangan calon mencapai 355.612 suara sekitar 85,20 persen. (lampiran Tabel 11).

Gambar 3.4
Persentase Perolehan Suara Kepala Daerah Terpilih Dalam Pilkada
Kabupaten/Kota, Periode Pemilihan 2015 – 2018

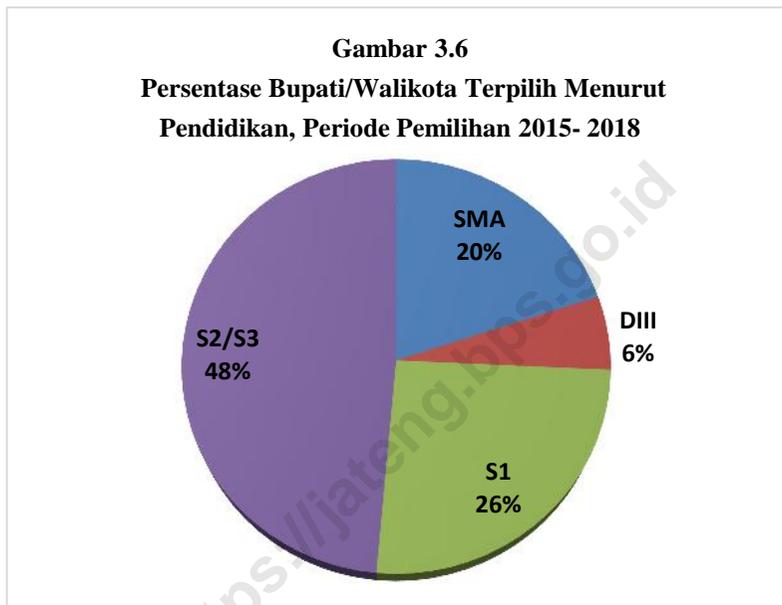


Berdasarkan jenis kelamin, bupati/walikota yang saat ini sedang menjabat sebanyak 29 kepala daerah (sekitar 82,86 persen) adalah laki-laki dan sebanyak 6 (lima) kepala daerah (sekitar 17,14 persen) adalah perempuan. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tingkat kualitas dari calon bupati/walikota, atau bahkan mungkin karena masyarakat yang secara umum masih menyukai dipimpin oleh laki-laki. (Lampiran Tabel 12).



Jika kualitas yang menjadi pertimbangan para pemilih dalam menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih, tentunya ini harus menjadi perhatian bagi para peserta pemilu untuk memilih calon bupati/walikota yang mempunyai kualitas pendidikan dan kepemimpinan yang lebih baik, namun bila penyebabnya adalah karena masih kuatnya pandangan bahwa pemimpin adalah laki-laki maka akan lebih sulit mengubah paradigma sosial yang ada di masyarakat.

Tingkat pendidikan sangat menentukan cara pandang seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan tingginya pendidikan kepala daerah tentunya akan lebih meningkatkan kualitas hasil dari kinerja kepala daerah itu sendiri dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya.



Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir bupati/walikota hasil pilkada di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, lebih dari 70 persen berpendidikan sarjana ke atas dengan rincian sebanyak 48,57 persen tamat S2 dan 25,71 persen tamat S1. Sedangkan yang berpendidikan Diploma III sekitar 5,71 persen dan yang berpendidikan setingkat SLTA hanya sekitar 20 persen. (Lampiran Tabel 12).

BAB IV

LEMBAGA DEMOKRASI

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti dalam BPS, 2014).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman dalam BPS, 2014).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

4.1 Partai Politik

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan.

Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, dalam BPS, 2014).

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Hingga tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional yang lolos sebagai peserta pemilu, termasuk di Jawa Tengah.

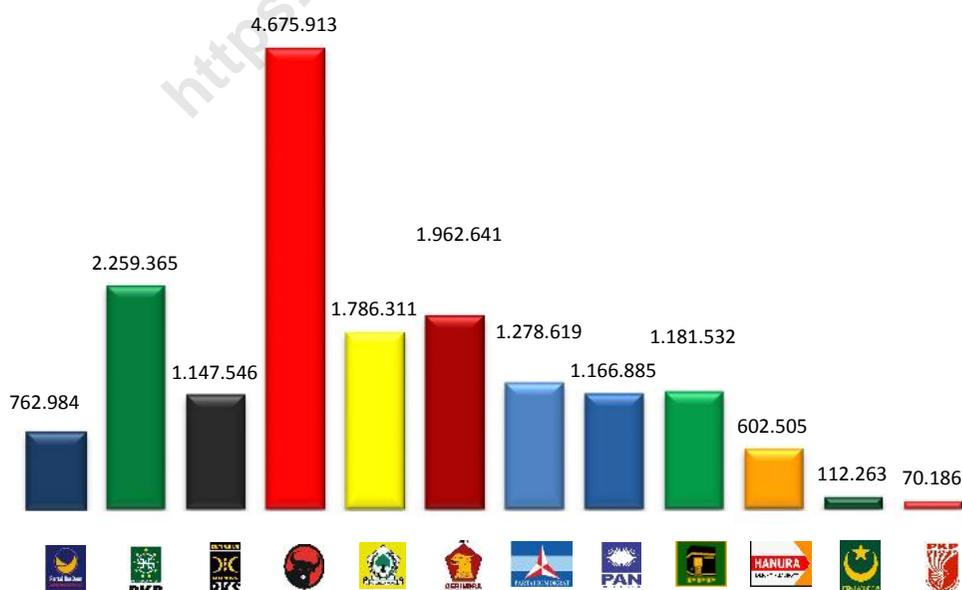
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

4.2.1 Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD.

Pada pemilu legislatif tahun 2014, jumlah kontestan peserta pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 (dua belas) partai politik, yaitu: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Gambar 4.1
Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014
untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

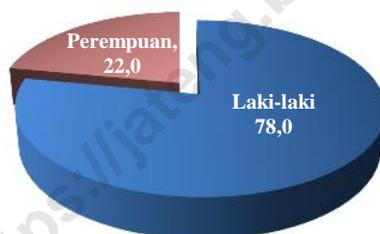


Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

4.2.2 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota legislatif pilihan rakyat atau wakil rakyat yang mewakili aspirasi dari rakyat. Di dalam undang-undang pemilu ada kewajiban bagi parpol untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD. Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keperpihakan terhadap perempuan.

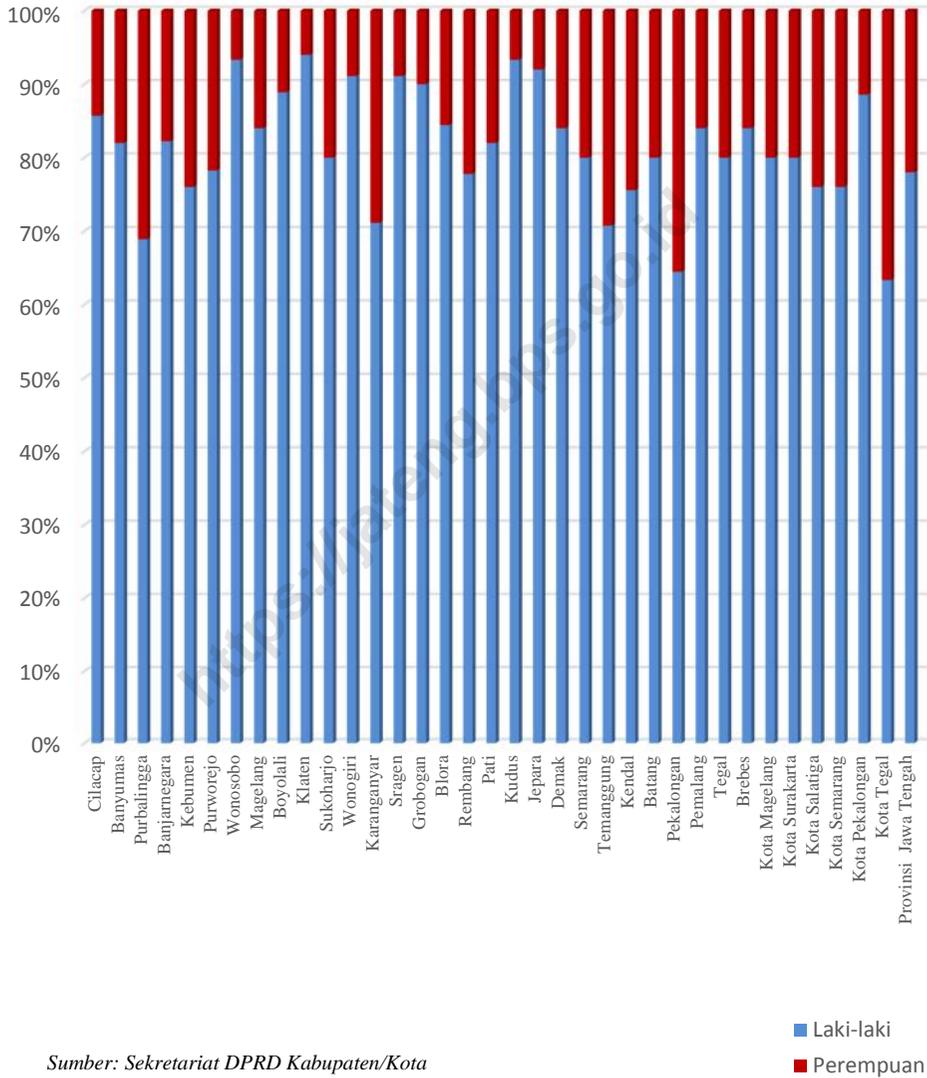
Gambar 4.2
Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Secara umum semua partai politik peserta pemilu telah mengusung perempuan sebagai caleg, sesuai dengan undang-undang pemilu sebanyak 30 persen dari total calon yang ada. Namun kenyataannya dari jumlah calon tersebut yang terpilih menjadi anggota DPRD rata-rata di Jawa Tengah tahun 2018 baru sekitar 18,37 persen. Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal merupakan dua wilayah di Jawa Tengah dengan jumlah anggota DPRD lebih dari 30 persen, yaitu masing-masing sekitar 35,56 persen dan 36,67 persen. Persentase jumlah anggota DPRD perempuan yang terendah berada di Kabupaten Klaten yaitu 6 (enam) persen. (Lampiran Tabel 14). Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bagi partai politik peserta pemilu untuk lebih meningkatkan kaderisasi anggota dari kelompok perempuan.

Gambar 4.3
Persentase Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018



4.3 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Safa'at, 2011:4). Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasi kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah (Budiardjo, 2008:383).

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (pada waktu yang sama) tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Setelah reformasi, kebebasan organisasi dijamin Undang-Undang. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legalitas tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Sekalipun demikian, berdasarkan data dari Bakesbangpol Kabupaten/Kota, dari keseluruhan jenis organisasi masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan penambahan jumlah dari tahun ke tahun.

Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya. Semakin banyak Ormas/LSM yang produktif pada suatu daerah, maka semakin terbantu pula tugas dari pemerintahan daerah.

Gambar 4.4
Jumlah Total Ormas/LSM yang Terdaftar
di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2016-2018

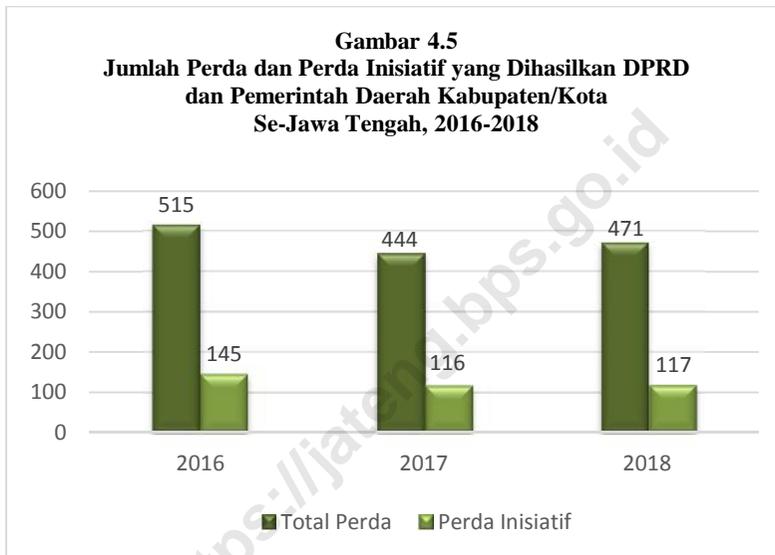


Sumber: Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah

4.4 Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat bersama karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Jumlah peraturan daerah di tiap kabupaten/kota bervariasi dari tahun 2016 hingga 2018. Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah. Secara total, jumlah peraturan daerah yang dihasilkan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada tahun 2016 sebanyak 515 perda. Jumlah tersebut menurun menjadi 444 perda pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 471 perda pada tahun 2018. Kondisi ini tentunya diharapkan lebih meningkatkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Dari sejumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan, di dalamnya termasuk perda yang merupakan inisiatif DPRD. Perda Inisiatif merupakan perda yang dirancang berdasarkan inisiatif dari DPRD. Secara total, jumlah perda inisiatif DPRD Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah selama tahun 2016 sebanyak 145 perda. Pada tahun 2017 perda inisiatif DPRD yang dihasilkan sebanyak 116 perda dan 117 perda di tahun 2018.



Sumber: Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB V

KEAMANAN

5.1 Indikator Utama Kejahatan

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Menurut falsafah, dalam kehidupan negara aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan dalam negeri, negara tidak dapat mempertahankan hidupnya, termasuk didalamnya permasalahan hukum yang mengaturnya yang berhubungan erat dengan keamanan.

Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin banyak tindak pidana pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Secara umum indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Berdasarkan data Biro Ops Kepolisian Daerah Jawa Tengah, selama kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2016-2018) kejadian atau tindak kriminalitas di Jawa Tengah mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 13.425 kasus tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah selama tahun 2016. Jumlah kejadian tindak kriminalitas tersebut mengalami penurunan menjadi sebanyak 11.420 kasus (tahun 2017) dan terus menurun menjadi sebanyak 9.834 kasus pada tahun 2018. (Lampiran Tabel 20). Laporan Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Polri menekan jumlah tindak kriminalitas selama tahun 2018 tidak terlepas dari peranan Polri yang berupaya meningkatkan kinerjanya, dapat dilihat dari jumlah Polsek/Polsekta yang

tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 551 Polsek/Polsekta (Lampiran Tabel 18). Di lain pihak, meningkatnya kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan stabilitas perekonomian nasional turut menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

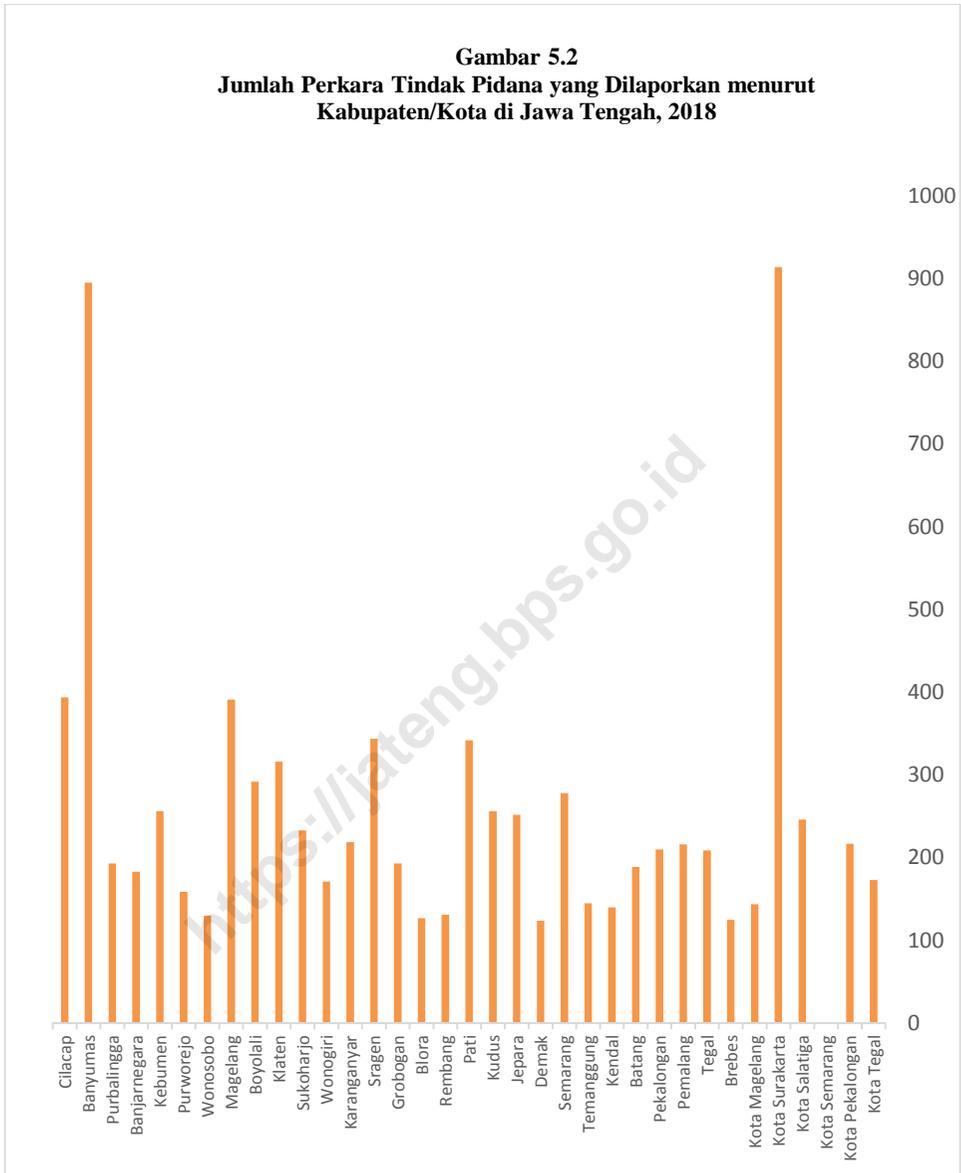


Sumber: Polda Jawa Tengah

Gambar 5.2 menyajikan jumlah kejadian tindak kriminalitas atau *crime total* yang terjadi di kabupaten/kota se- Jawa Tengah selama tahun 2018, berkisar antara 124 – 1 027 kasus. Dari Gambar 5.2 nampak bahwa lima kabupaten/kota yang paling rawan terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling tinggi selama tahun 2018 berturut-turut adalah Kota Semarang (1 027 kasus), Kota Surakarta (914 kasus), Kabupaten Banyumas (895 kasus), Kabupaten Cilacap (394 kasus) dan Kabupaten Magelang (391 kasus).

Sebaliknya lima kabupaten/kota yang paling aman terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling rendah selama tahun 2018 berturut-turut adalah Kabupaten Demak (124 kasus), Kabupaten Brebes (125 kasus), Kabupaten Blora (127 kasus), Kabupaten Wonosobo (130 kasus), dan Kabupaten Rembang (131 kasus).

Gambar 5.2
Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan menurut
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2018

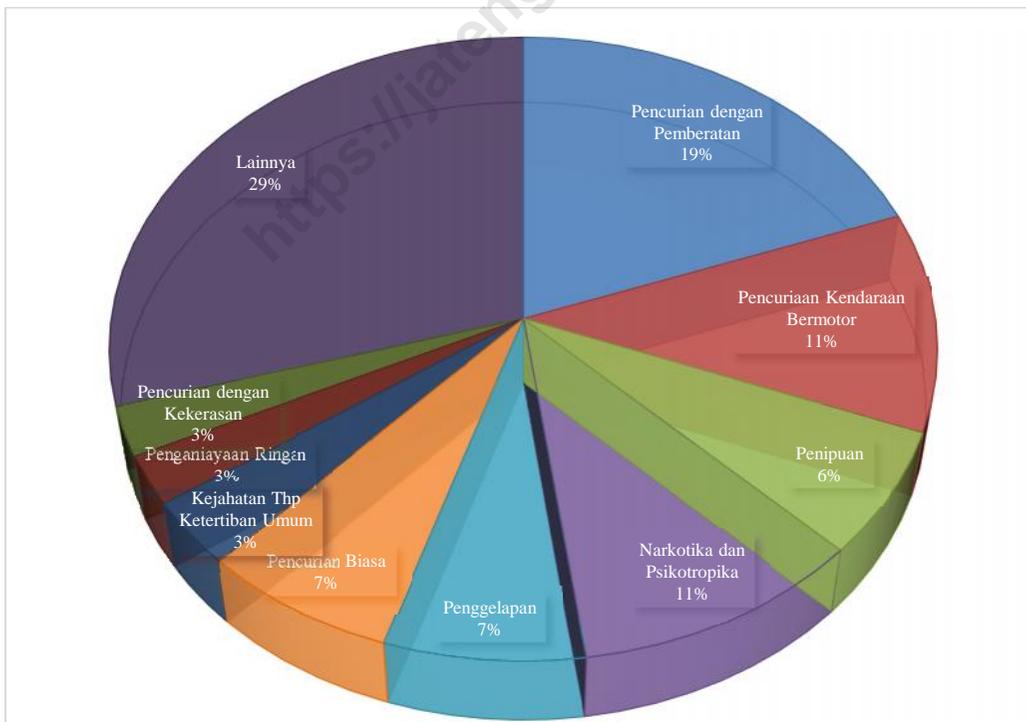


Sumber: Polres/Polresta Kabupaten/Kota

5.2 Kejadian Kejahatan Menurut Jenisnya

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Jawa Tengah, peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di wilayah Jawa Tengah secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Selama tahun 2018 kejahatan konvensional yang sering terjadi dan dilaporkan selama tahun 2018, antara lain: pencurian dengan pemberatan (currat) sebanyak 1.875 kasus (19,43 persen), pencurian kendaraan bermotor (curranmor) sebanyak 1.096 kasus (11,36 persen) dan narkoba dan psikotropika sebanyak 1.014 kasus (10,51 persen), serta kasus penipuan sebanyak 627 kasus (6,50 persen). Jenis kejahatan penganiayaan, penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembunuhan merupakan jenis kejahatan yang meskipun secara jumlah tidak terlalu banyak, namun perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya.

Gambar 5.3
Persentase Kejadian Kejahatan Menurut Jenisnya di Jawa Tengah, 2018



Sumber: Polres/Polresta

LAMPIRAN

<https://jatekampus.go.id>

Tabel 1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2 138,51	24	284	1 719 504
2	Kab. Banyumas	1 327,59	27	331	1 679 124
3	Kab. Purbalingga	777,65	18	239	925 193
4	Kab. Banjarnegara	1 069,74	20	278	918 219
5	Kab. Kebumen	1 282,74	26	460	1 195 092
6	Kab. Purworejo	1.034,82	16	494	716 477
7	Kab. Wonosobo	984,68	15	265	787 384
8	Kab. Magelang	1 085,73	21	372	1 279 625
9	Kab. Boyolali	1.015,07	22	267	979 799
10	Kab. Klaten	655,56	26	401	1 171 411
11	Kab. Sukoharjo	466,66	12	167	885 205
12	Kab. Wonogiri	1 822,37	25	294	957 106
13	Kab. Karanganyar	772,20	17	177	879 078
14	Kab. Sragen	946,49	20	208	887 889
15	Kab. Grobogan	1 795,85	19	280	1 371 610
16	Kab. Blora	1 794,40	16	295	862 110
17	Kab. Rembang	1 014,10	14	294	633 584
18	Kab. Pati	1 491,20	21	406	1 253 299
19	Kab. Kudus	425,17	9	132	861 430
20	Kab. Jepara	1 004,16	16	195	1 240 600
21	Kab. Demak	897,43	14	249	1 151 796
22	Kab. Semarang	946,86	19	235	1 040 629
23	Kab. Temanggung	870,23	20	289	765 594
24	Kab. Kendal	1 002,27	20	286	964 106
25	Kab. Batang	788,95	15	248	762 377
26	Kab. Pekalongan	836,13	19	285	891 892
27	Kab. Pemasang	1 011,90	14	222	1 299 724
28	Kab. Tegal	879,70	18	287	1 437 225
29	Kab. Brebes	1 657,73	17	297	1 802 829
30	Kota Magelang	18,12	3	17	121 872
31	Kota Surakarta	44,03	5	51	517 887
32	Kota Salatiga	52,96	4	23	191 571
33	Kota Semarang	373,67	16	177	1 786 114
34	Kota Pekalongan	44,96	4	27	304 477
35	Kota Tegal	34,49	4	27	249 003
	Provinsi Jawa Tengah	32 544,12	576	8559	34 490 835

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

*) Hasil Proyeksi BPS Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SP2010

Tabel 2
Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan	
		Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap		15 Februari 2017
2	Kab. Banyumas		27 Juni 2018
3	Kab. Purbalingga		9 Desember 2015
4	Kab. Banjarnegara		15 Februari 2017
5	Kab. Kebumen		9 Desember 2015
6	Kab. Purworejo		9 Desember 2015
7	Kab. Wonosobo		9 Desember 2015
8	Kab. Magelang		27 Juni 2018
9	Kab. Boyolali		9 Desember 2015
10	Kab. Klaten		9 Desember 2015
11	Kab. Sukoharjo		9 Desember 2015
12	Kab. Wonogiri		9 Desember 2015
13	Kab. Karanganyar		27 Juni 2018
14	Kab. Sragen		9 Desember 2015
15	Kab. Grobogan		9 Desember 2015
16	Kab. Blora		9 Desember 2015
17	Kab. Rembang		9 Desember 2015
18	Kab. Pati		15 Februari 2017
19	Kab. Kudus		27 Juni 2018
20	Kab. Jepara		15 Februari 2017
21	Kab. Demak		9 Desember 2015
22	Kab. Semarang		9 Desember 2015
23	Kab. Temanggung		27 Juni 2018
24	Kab. Kendal		9 Desember 2015
25	Kab. Batang		15 Februari 2017
26	Kab. Pekalongan		9 Desember 2015
27	Kab. Pemasang		9 Desember 2015
28	Kab. Tegal		27 Juni 2018
29	Kab. Brebes		15 Februari 2017
30	Kota Magelang		9 Desember 2015
31	Kota Surakarta		9 Desember 2015
32	Kota Salatiga		15 Februari 2017
33	Kota Semarang		9 Desember 2015
34	Kota Pekalongan		9 Desember 2015
35	Kota Tegal		27 Juni 2018
Provinsi Jawa Tengah		27 Juni 2018	

Sumber: KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3
Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 Menurut
Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1 447 881	946 272	65,36
2	Kab. Banyumas	1 314 944	978 002	74,38
3	Kab. Purbalingga	737 674	504 489	68,39
4	Kab. Banjarnegara	770 732	511 096	66,31
5	Kab. Kebumen	1 053 495	681 319	64,67
6	Kab. Purworejo	607 237	409 958	67,51
7	Kab. Wonosobo	661 371	470 115	71,08
8	Kab. Magelang	971 109	768 071	79,09
9	Kab. Boyolali	781 650	585 476	74,90
10	Kab. Klaten	982 322	677 799	69,00
11	Kab. Sukoharjo	657 563	483 401	73,51
12	Kab. Wonogiri	856 334	590 587	68,97
13	Kab. Karanganyar	686 514	549 362	80,02
14	Kab. Sragen	765 816	500 413	65,34
15	Kab. Grobogan	1 089 214	645 404	59,25
16	Kab. Blora	690 823	434 192	62,85
17	Kab. Rembang	477 470	313 934	65,75
18	Kab. Pati	1 014 593	598 180	58,96
19	Kab. Kudus	617 758	520 589	84,27
20	Kab. Jepara	848 065	516 255	60,87
21	Kab. Demak	849 615	486 698	57,28
22	Kab. Semarang	759 630	570 318	75,08
23	Kab. Temanggung	597 093	509 410	85,32
24	Kab. Kendal	759 880	519 030	68,30
25	Kab. Batang	589 566	374 058	63,45
26	Kab. Pekalongan	717 508	442 400	61,66
27	Kab. Pemalang	1 082 135	637 803	58,94
28	Kab. Tegal	1 189 811	770 012	64,72
29	Kab. Brebes	1 459 866	841 738	57,66
30	Kota Magelang	90 546	68 910	76,10
31	Kota Surakarta	405 597	311 178	76,72
32	Kota Salatiga	131 827	102 915	78,07
33	Kota Semarang	1 130 252	811 505	71,80
34	Kota Pekalongan	218 301	134 861	61,78
35	Kota Tegal	202 299	143 742	71,05
	Provinsi Jawa Tengah	27 216 491	18 409 492	67,64

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 4
Jumlah Pemilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018
Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	724 321	723 560	1 447 881
2	Kab. Banyumas	655 156	659 788	1 314 944
3	Kab. Purbalingga	370 345	367 329	737 674
4	Kab. Banjarnegara	388 995	381 737	770 732
5	Kab. Kebumen	531 353	522 142	1 053 495
6	Kab. Purworejo	301 247	305 990	607 237
7	Kab. Wonosobo	336 193	325 178	661 371
8	Kab. Magelang	483 566	487 543	971 109
9	Kab. Boyolali	388 249	393 401	781 650
10	Kab. Klaten	483 722	498 600	982 322
11	Kab. Sukoharjo	325 641	331 922	657 563
12	Kab. Wonogiri	423 815	432 519	856 334
13	Kab. Karanganyar	338 985	347 529	686 514
14	Kab. Sragen	378 288	387 528	765 816
15	Kab. Grobogan	541 225	547 989	1 089 214
16	Kab. Blora	340 600	350 223	690 823
17	Kab. Rembang	237 525	239 945	477 470
18	Kab. Pati	498 389	516 204	1 014 593
19	Kab. Kudus	304 425	313 333	617 758
20	Kab. Jepara	423 423	424 642	848 065
21	Kab. Demak	424 670	424 945	849 615
22	Kab. Semarang	374 282	385 348	759 630
23	Kab. Temanggung	296 688	300 405	597 093
24	Kab. Kendal	378 012	381 868	759 880
25	Kab. Batang	294 227	295 339	589 566
26	Kab. Pekalongan	361 613	355 895	717 508
27	Kab. Pemalang	545 781	536 354	1 082 135
28	Kab. Tegal	600 988	588 823	1 189 811
29	Kab. Brebes	734 338	725 528	1 459 866
30	Kota Magelang	43 622	46 924	90 546
31	Kota Surakarta	197 285	208 312	405 597
32	Kota Salatiga	63 841	67 986	131 827
33	Kota Semarang	548 442	581 810	1 130 252
34	Kota Pekalongan	109 429	108 872	218 301
35	Kota Tegal	100 716	101 583	202 299
	Provinsi Jawa Tengah	13 549 397	13 667 094	27 216 491

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 5
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah 2018 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	442 868	503 404	946 272
2	Kab. Banyumas	460 368	517 634	978 002
3	Kab. Purbalingga	225 263	279 226	504 489
4	Kab. Banjarnegara	236 651	274 445	511 096
5	Kab. Kebumen	316 132	365 187	681 319
6	Kab. Purworejo	193 652	216 306	409 958
7	Kab. Wonosobo	229 890	240 225	470 115
8	Kab. Magelang	373 670	394 401	768 071
9	Kab. Boyolali	278 163	307 313	585 476
10	Kab. Klaten	314 109	363 690	677 799
11	Kab. Sukoharjo	228 959	254 442	483 401
12	Kab. Wonogiri	280 309	310 278	590 587
13	Kab. Karanganyar	264 580	284 782	549 362
14	Kab. Sragen	228 795	271 618	500 413
15	Kab. Grobogan	288 469	356 935	645 404
16	Kab. Blora	195 819	238 373	434 192
17	Kab. Rembang	139 339	174 595	313 934
18	Kab. Pati	262 493	335 687	598 180
19	Kab. Kudus	249 554	271 035	520 589
20	Kab. Jepara	228 235	288 020	516 255
21	Kab. Demak	221 710	264 988	486 698
22	Kab. Semarang	269 700	300 618	570 318
23	Kab. Temanggung	251 390	258 020	509 410
24	Kab. Kendal	248 283	270 747	519 030
25	Kab. Batang	168 580	205 478	374 058
26	Kab. Pekalongan	196 323	246 077	442 400
27	Kab. Pemasang	278 293	359 510	637 803
28	Kab. Tegal	344 428	425 584	770 012
29	Kab. Brebes	372 436	469 302	841 738
30	Kota Magelang	31 929	36 981	68 910
31	Kota Surakarta	146 379	164 799	311 178
32	Kota Salatiga	48 081	54 834	102 915
33	Kota Semarang	375 983	435 522	811 505
34	Kota Pekalongan	61 873	72 988	134 861
35	Kota Tegal	66 895	76 847	143 742
	Provinsi Jawa Tengah	8 519 601	9 889 891	18 409 492

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 6
Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah 2018 Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	61,14	69,57	65,36
2	Kab. Banyumas	70,27	78,45	74,38
3	Kab. Purbalingga	60,83	76,02	68,39
4	Kab. Banjarnegara	60,84	71,89	66,31
5	Kab. Kebumen	59,50	69,94	64,67
6	Kab. Purworejo	64,28	70,69	67,51
7	Kab. Wonosobo	68,38	73,87	71,08
8	Kab. Magelang	77,27	80,90	79,09
9	Kab. Boyolali	71,65	78,12	74,90
10	Kab. Klaten	64,94	72,94	69,00
11	Kab. Sukoharjo	70,31	76,66	73,51
12	Kab. Wonogiri	66,14	71,74	68,97
13	Kab. Karanganyar	78,05	81,94	80,02
14	Kab. Sragen	60,48	70,09	65,34
15	Kab. Grobogan	53,30	65,14	59,25
16	Kab. Blora	57,49	68,06	62,85
17	Kab. Rembang	58,66	72,76	65,75
18	Kab. Pati	52,67	65,03	58,96
19	Kab. Kudus	81,98	86,50	84,27
20	Kab. Jepara	53,90	67,83	60,87
21	Kab. Demak	52,21	62,36	57,28
22	Kab. Semarang	72,06	78,01	75,08
23	Kab. Temanggung	84,73	85,89	85,32
24	Kab. Kendal	65,68	70,90	68,30
25	Kab. Batang	57,30	69,57	63,45
26	Kab. Pekalongan	54,29	69,14	61,66
27	Kab. Pemalang	50,99	67,03	58,94
28	Kab. Tegal	57,31	72,28	64,72
29	Kab. Brebes	50,72	64,68	57,66
30	Kota Magelang	73,19	78,81	76,10
31	Kota Surakarta	74,20	79,11	76,72
32	Kota Salatiga	75,31	80,65	78,07
33	Kota Semarang	68,55	74,86	71,80
34	Kota Pekalongan	56,54	67,04	61,78
35	Kota Tegal	66,42	75,65	71,05
	Provinsi Jawa Tengah	66,88	72,36	67,64

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 7
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah 2018 Menurut Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	924 821	21 451	946 272
2	Kab. Banyumas	922 513	55 489	978 002
3	Kab. Purbalingga	484 408	20 081	504 489
4	Kab. Banjarnegara	490 678	20 418	511 096
5	Kab. Kebumen	657 785	23 534	681 319
6	Kab. Purworejo	394 292	15 666	409 958
7	Kab. Wonosobo	433 661	36 454	470 115
8	Kab. Magelang	709 195	58 876	768 071
9	Kab. Boyolali	566 644	18 832	585 476
10	Kab. Klaten	652 063	25 736	677 799
11	Kab. Sukoharjo	466 778	16 623	483 401
12	Kab. Wonogiri	577 110	13 477	590 587
13	Kab. Karanganyar	522 507	26 855	549 362
14	Kab. Sragen	488 908	11 505	500 413
15	Kab. Grobogan	631 718	13 686	645 404
16	Kab. Blora	416 693	17 499	434 192
17	Kab. Rembang	302 863	11 071	313 934
18	Kab. Pati	575 891	22 289	598 180
19	Kab. Kudus	473 595	46 994	520 589
20	Kab. Jepara	501 671	14 584	516 255
21	Kab. Demak	474 562	12 136	486 698
22	Kab. Semarang	548 032	22 286	570 318
23	Kab. Temanggung	467 784	41 626	509 410
24	Kab. Kendal	489 730	29 300	519 030
25	Kab. Batang	353 439	20 619	374 058
26	Kab. Pekalongan	426 172	16 228	442 400
27	Kab. Pemalang	620 267	17 536	637 803
28	Kab. Tegal	723 175	46 837	770 012
29	Kab. Brebes	822 167	19 571	841 738
30	Kota Magelang	65 207	3 703	689 10
31	Kota Surakarta	300 178	11 000	311 178
32	Kota Salatiga	98 863	4 052	102 915
33	Kota Semarang	786 656	24 849	811 505
34	Kota Pekalongan	127 356	7 505	134 861
35	Kota Tegal	133 305	10 437	143 742
	Provinsi Jawa Tengah	17 630 687	778 805	18 409 492

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 8
Jumlah Suara Sah dan Perolehan Suara Pasangan Terpilih Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Perolehan Suara Pasangan Terpilih	
			Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	924 821	512 146	55,4
2	Kab. Banyumas	922 513	542 408	58,8
3	Kab. Purbalingga	484 408	241 984	50,0
4	Kab. Banjarnegara	490 678	267 723	54,6
5	Kab. Kebumen	657 785	292 238	44,4
6	Kab. Purworejo	394 292	208 411	52,9
7	Kab. Wonosobo	433 661	231 154	53,3
8	Kab. Magelang	709 195	412 247	58,1
9	Kab. Boyolali	566 644	403 890	71,3
10	Kab. Klaten	652 063	397 715	61,0
11	Kab. Sukoharjo	466 778	270 243	57,9
12	Kab. Wonogiri	577 110	362 436	62,8
13	Kab. Karanganyar	522 507	298 325	57,1
14	Kab. Sragen	488 908	262 630	53,7
15	Kab. Grobogan	631 718	420 899	66,6
16	Kab. Blora	416 693	239 879	57,6
17	Kab. Rembang	302 863	215 060	71,0
18	Kab. Pati	575 891	336 886	58,5
19	Kab. Kudus	473 595	348 352	73,6
20	Kab. Jepara	501 671	358 479	71,5
21	Kab. Demak	474 562	268 052	56,5
22	Kab. Semarang	548 032	364 169	66,5
23	Kab. Temanggung	467 784	295 168	63,1
24	Kab. Kendal	489 730	298 480	60,9
25	Kab. Batang	353 439	224 409	63,5
26	Kab. Pekalongan	426 172	256 084	60,1
27	Kab. Pemasang	620 267	352 281	56,8
28	Kab. Tegal	723 175	321 064	44,4
29	Kab. Brebes	822 167	324 997	39,5
30	Kota Magelang	65 207	42 990	65,9
31	Kota Surakarta	300 178	216 107	72,0
32	Kota Salatiga	98 863	67 246	68,0
33	Kota Semarang	786 656	557 289	70,8
34	Kota Pekalongan	127 356	79 705	62,6
35	Kota Tegal	133 305	71 548	53,7
	Provinsi Jawa Tengah	17 630 687	10 362 694	58,8

Sumber: *infopemilu.kpu.go.id*

Tabel 9
Jumlah Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam
Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di
Jawa Tengah, Periode Pemilihan 2015 - 2018

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Bupati/Walikota 2015 – 2018		
		Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1 472 242	937 929	63,7
2	Kab. Banyumas	1 314 312	977 512	74,4
3	Kab. Purbalingga	739 475	443 808	60,0
4	Kab. Banjarnegara	603 019	546 019	90,5
5	Kab. Kebumen	1 082 031	700 014	64,7
6	Kab. Purworejo	633 645	391 102	61,7
7	Kab. Wonosobo	666 308	485 130	72,8
8	Kab. Magelang	970 643	767 968	79,1
9	Kab. Boyolali	772 142	607 101	78,6
10	Kab. Klaten	1 043 183	689 387	66,1
11	Kab. Sukoharjo	627 740	445 164	70,9
12	Kab. Wonogiri	865 253	571 470	66,0
13	Kab. Karanganyar	686 514	549 224	80,0
14	Kab. Sragen	784 875	552 372	70,4
15	Kab. Grobogan	1 066 436	702 559	65,9
16	Kab. Blora	706 604	505 878	71,6
17	Kab. Rembang	482 742	355 934	73,7
18	Kab. Pati	1 034 256	712 421	68,8
19	Kab. Kudus	617 574	520 310	84,2
20	Kab. Jepara	865 345	639 893	73,9
21	Kab. Demak	862 181	583 687	67,7
22	Kab. Semarang	743 898	520 450	70,0
23	Kab. Temanggung	597 006	509 320	85,3
24	Kab. Kendal	760 920	512 965	67,4
25	Kab. Batang	601 321	446 518	74,2
26	Kab. Pekalongan	729 708	509 749	69,9
27	Kab. Pemasang	1 123 221	666 756	59,4
28	Kab. Tegal	1 189 444	769 899	64,7
29	Kab. Brebes	1 532 249	838 167	54,7
30	Kota Magelang	90 210	67 792	75,1
31	Kota Surakarta	402 697	294 137	73,0
32	Kota Salatiga	131 917	108 945	82,6
33	Kota Semarang	1 117 874	731 407	65,4
34	Kota Pekalongan	224 629	164 803	73,4
35	Kota Tegal	202 121	143 451	70,9

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 10
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pilkada Bupati/Walikota dan
Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Jawa Tengah,
Periode Pemilihan 2015 - 2018

No	Kabupaten/Kota	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Total
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	914 507	23 422	937 929
2	Kab. Banyumas	923 626	53 886	977 512
3	Kab. Purbalingga	418 313	25 495	443 808
4	Kab. Banjarnegara	526 430	19 589	546 019
5	Kab. Kebumen	684 619	15 395	700 014
6	Kab. Purworejo	369 652	21 450	391 102
7	Kab. Wonosobo	462 419	22 711	485 130
8	Kab. Magelang	706 535	61 433	767 968
9	Kab. Boyolali	593 528	13 573	607 101
10	Kab. Klaten	657 631	31 756	689 387
11	Kab. Sukoharjo	417 404	27 760	445 164
12	Kab. Wonogiri	559 431	12 039	571 470
13	Kab. Karanganyar	528 137	21 087	549 224
14	Kab. Sragen	544 237	8 135	552 372
15	Kab. Grobogan	691 908	10 651	702 559
16	Kab. Blora	495 181	10 697	505 878
17	Kab. Rembang	347 366	8 568	355 934
18	Kab. Pati	697 437	14 984	712 421
19	Kab. Kudus	503 419	16 891	520 310
20	Kab. Jepara	624 096	15 797	639 893
21	Kab. Demak	569 885	13 802	583 687
22	Kab. Semarang	487 348	33 102	520 450
23	Kab. Temanggung	476 298	38 022	509 320
24	Kab. Kendal	466 057	46 908	512 965
25	Kab. Batang	432 942	13 576	446 518
26	Kab. Pekalongan	498 076	11 673	509 749
27	Kab. Pemasang	649 994	16 762	666 756
28	Kab. Tegal	730 172	39 727	769 899
29	Kab. Brebes	818 657	19 510	838 167
30	Kota Magelang	63 262	4 530	67 792
31	Kota Surakarta	281 364	12 773	294 137
32	Kota Salatiga	105 112	3 833	108 945
33	Kota Semarang	690 694	40 713	731 407
34	Kota Pekalongan	158 366	6 437	164 803
35	Kota Tegal	135 868	7 583	143 451

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Tabel 11
Jumlah Kandidat, Perolehan Suara dan Partai Pengusung Pasangan Terpilih
Pada Pilkada Terakhir di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah		Partai Pendukung
			Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	3	515 059	56,32	Demokrat, Golkar, PKB, PAN
2	Kab. Banyumas	2	515 329	55,79	PDI-P; Nasdem, Demokrat
3	Kab. Purbalingga	2	228 037	54,51	PDI-P, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem
4	Kab. Banjarnegara	3	285 117	54,21	Golkar, PPP, Demokrat
5	Kab. Kebumen	3	350 089	51,14	Demokrat, Gerindra, PAN, PKB
6	Kab. Purworejo	3	183 687	49,69	Demokrat, Hanura, Golkar
7	Kab. Wonosobo	4	216 478	46,81	PKS, PPP, Hanura
8	Kab. Magelang	2	392 789	55,59	PDI-P, PKB, PPP, PAN, Demokrat
9	Kab. Boyolali	2	413 572	69,68	PDI-P
10	Kab. Klaten	3	321 593	48,90	PDI-P, Nasdem
11	Kab. Sukoharjo	2	355 612	85,20	PDI-P
12	Kab. Wonogiri	2	304 755	54,48	PDIP, Nasdem
13	Kab. Karanganyar	2	296 895	56,22	PDIP, PPP, Hanura, PAN, Gerindra, PKB, GOLKAR, Demokrat
14	Kab. Sragen	4	221 366	40,67	Gerindra, PKS
15	Kab. Grobogan	2	505 507	73,06	PDIP, PKB, PAN, Hanura
16	Kab. Blora	3	253 394	51,17	PKB, Nasdem, Hanura
17	Kab. Rembang	3	237 963	68,50	Perseorangan
18	Kab. Pati	1	519 675	74,51	PDI-P, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, PPP
19	Kab. Kudus	5	213 990	42,51	PKB, Hanura, PPP
20	Kab. Jepara	2	319 837	51,25	PDI-P
21	Kab. Demak	3	309 251	54,27	Golkar, PPP
22	Kab. Semarang	2	316 420	64,93	PDI-P, Gerindra, PAN
23	Kab. Temanggung	3	258 734	54,32	Golkar, Gerindra, PPP, PAN
24	Kab. Kendal	2	289 970	62,22	Hanura, PKS, PAN, Gerindra
25	Kab. Batang	4	245 181	56,60	Golkar, PPP
26	Kab. Pekalongan	2	250 523	50,30	PKB
27	Kab. Pemalang	3	343 553	52,85	PDIP
28	Kab. Tegal	3	518 017	70,94	PKB
29	Kab. Brebes	2	548 621	67,02	PDI-P, PPP, Hanura, PKB, Golkar, Demokrat, PAN
30	Kota Magelang	3	30 751	48,61	PDI-P, Gerindra
31	Kota Surakarta	2	169 902	60,39	PDI-P
32	Kota Salatiga	2	53 052	50,47	Golkar, Nasdem, PPP, Gerindra, PKS, Demokrat
33	Kota Semarang	3	320 237	46,36	PDI-P, Demokrat, Nasdem
34	Kota Pekalongan	3	73 946	46,69	PDI-P, PKB
35	Kota Tegal	5	38 091	28,04	Gerindra, PAN, PPP, PKS, Demokrat

Sumber: KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12
Kepala Daerah Terpilih Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Usia saat Dilantik, Jabatan Sebelumnya dan Tanggal Pelantikan

Kabupaten/Kota	Nama Bupati/Walikota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir saat Dilantik
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	H. Tatto Suwanto Pamuji	Laki-laki	STM
Kab. Banyumas	Ir. H. Achmad Husein	Laki-laki	S1
Kab. Purbalingga	H. Tasdi, SH, M.M.	Laki-laki	S2
Kab. Banjarnegara	Budhi Sarwono	Laki-laki	SMA
Kab. Kebumen	H. Mohammad Yahya Fuad, S.E.	Laki-laki	S1
Kab. Purworejo	Agus Bastian, S.E., M.M.	Laki-laki	S2
Kab. Wonosobo	Eko Purnomo, S.E., M.M.	Laki-laki	S2
Kab. Magelang	Zaenal Arifin, S.IP	Laki-laki	S1
Kab. Boyolali	Drs. Seno Samodro	Laki-laki	S1
Kab. Klaten	Hj. Sri Mulyani	Perempuan	SLTA
Kab. Sukoharjo	H. Wardoyo Wijaya, S.H., M.H.	Laki-laki	S2
Kab. Wonogiri	Joko Sutopo	Laki-laki	SMA
Kab. Karanganyar	Drs. H. Juliyatmono, M.M.	Laki-laki	S2
Kab. Sragen	dr. Kusdinar Untung Yuni S	Perempuan	S1
Kab. Grobogan	Sri Sumarni, S.H., M.M.	Perempuan	S2
Kab. Blora	Letkol. Inf (Purn) H. Djoko Nugroho	Laki-laki	Akmlil
Kab. Rembang	H. Abdul Hafidz	Laki-laki	SLTA
Kab. Pati	H. Haryanto, S.H, M.M, M.Si	Laki-laki	S2
Kab. Kudus	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT	Laki-laki	S2
Kab. Jepara	H. Ahmad Marzuqi, S.E.	Laki-laki	S1
Kab. Demak	HM Natsir	Laki-laki	D3
Kab. Semarang	dr. Mudjirin, S.E, Sp. OG	Laki-laki	S2
Kab. Temanggung	H.M. Al Khadziq	Laki-laki	SMA
Kab. Kendal	dr. Mirna Annisa, MSi	Perempuan	S2
Kab. Batang	H. Wihaji, S.Ag, M.Pd	Laki-laki	S3
Kab. Pekalongan	H. Asip Kholbihi, SH, MSi	Laki-laki	S2
Kab. Pemasang	H. Junaedi, S.H, M.M	Laki-laki	S2
Kab. Tegal	Dra. Hj. Umi Azizah	Perempuan	S1
Kab. Brebes	Hj. Idza Priyanti, SE	Perempuan	S1
Kota Magelang	Ir. H. Sigit Widyonindito, MT	Laki-laki	S2
Kota Surakarta	F.X. Hadi Rudyatmo	Laki-laki	SMA
Kota Salatiga	Yuliyanto, S.E, M.M	Laki-laki	S2
Kota Semarang	Hendrar Prihadi, S.E., M.M	Laki-laki	S2
Kota Pekalongan	HM. Saelany Machfudz, S.E.	Laki-laki	S1
Kota Tegal	H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M.	Laki-laki	S2
Provinsi Jawa Tengah	H. Ganjar Pranowo	Laki-laki	S2

Sumber: KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Asal Partai, 2018

No	Kabupaten/Kota	NasDem	PKB	PKS	PDIP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	4	13	10	27
2	Kab. Banyumas	1	7	4	16
3	Kab. Purbalingga	1	5	5	11
4	Kab. Banjarnegara	3	5	5	6
5	Kab. Kebumen	5	6	3	9
6	Kab. Purworejo	2	6	4	8
7	Kab. Wonosobo	4	8	1	9
8	Kab. Magelang	0	9	3	10
9	Kab. Boyolali	0	2	4	25
10	Kab. Klaten	1	3	5	17
11	Kab. Sukoharjo	2	3	1	22
12	Kab. Wonogiri	1	1	6	13
13	Kab. Karanganyar	0	4	6	14
14	Kab. Sragen	0	7	6	11
15	Kab. Grobogan	4	7	3	12
16	Kab. Blora	3	5	5	6
17	Kab. Rembang	3	6	1	5
18	Kab. Pati	4	6	5	8
19	Kab. Kudus	4	6	4	9
20	Kab. Jepara	6	5	2	10
21	Kab. Demak	3	9	4	8
22	Kab. Semarang	0	5	5	11
23	Kab. Temanggung	0	6	3	7
24	Kab. Kendal	0	6	4	10
25	Kab. Batang	3	8	2	10
26	Kab. Pekalongan	0	12	1	11
27	Kab. Pemalang	0	7	5	13
28	Kab. Tegal	1	12	3	11
29	Kab. Brebes	0	8	6	11
30	Kota Magelang	1	2	3	7
31	Kota Surakarta	0	0	5	24
32	Kota Salatiga	1	2	4	8
33	Kota Semarang	0	4	6	16
34	Kota Pekalongan	1	7	3	5
35	Kota Tegal	1	5	3	8
	Provinsi Jawa Tengah	4	13	10	27

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab. Cilacap	10	11	9	8
2	Kab. Banyumas	6	6	3	4
3	Kab. Purbalingga	7	6	2	4
4	Kab. Banjarnegara	6	5	3	6
5	Kab. Kebumen	5	7	4	7
6	Kab. Purworejo	7	6	6	2
7	Kab. Wonosobo	4	4	4	3
8	Kab. Magelang	6	9	3	5
9	Kab. Boyolali	6	4	1	3
10	Kab. Klaten	8	5	2	5
11	Kab. Sukoharjo	5	5	2	5
12	Kab. Wonogiri	10	4	4	4
13	Kab. Karanganyar	8	4	4	2
14	Kab. Sragen	8	5	3	3
15	Kab. Grobogan	6	5	4	2
16	Kab. Blora	8	4	8	0
17	Kab. Rembang	3	5	8	2
18	Kab. Pati	6	8	6	0
19	Kab. Kudus	4	5	3	3
20	Kab. Jepara	5	8	2	2
21	Kab. Demak	9	8	2	2
22	Kab. Semarang	11	5	4	0
23	Kab. Temanggung	5 ¹⁾	4	2	5
24	Kab. Kendal	4	4	3	7
25	Kab. Batang	5	5	5	2
26	Kab. Pekalongan	5	5	2	4
27	Kab. Pemasang	7	7	0	3
28	Kab. Tegal	6	5	3	2
29	Kab. Brebes	7	5	4	5
30	Kota Magelang	4	2	3	1
31	Kota Surakarta	4	3	3	4
32	Kota Salatiga	2	4	3	0
33	Kota Semarang	5	7	6	6
34	Kota Pekalongan	9	2	0	3
35	Kota Tegal	4	2	2	2
Provinsi Jawa Tengah		10	11	9	8

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

1) Merupakan partai koalisi

Tabel 13 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	PPP	Hanura	PBB	Total
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Kab. Cilacap	8	0	0	49
2	Kab. Banyumas	3	0	0	50
3	Kab. Purbalingga	2	2	0	45
4	Kab. Banjarnegara	6	0	0	45
5	Kab. Kebumen	3	1	0	50
6	Kab. Purworejo	2	3	0	46
7	Kab. Wonosobo	4	4	0	45
8	Kab. Magelang	5	0	0	50
9	Kab. Boyolali	0	0	0	45
10	Kab. Klaten	2	2	0	50
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0	45
12	Kab. Wonogiri	2	0	0	45
13	Kab. Karanganyar	1	2	0	45
14	Kab. Sragen	1	1	0	45
15	Kab. Grobogan	4	3	0	49
16	Kab. Blora	5	1	0	45
17	Kab. Rembang	10	2	0	45
18	Kab. Pati	3	4	0	50
19	Kab. Kudus	3	3	1	45
20	Kab. Jepara	9	1	0	50
21	Kab. Demak	5	0	0	50
22	Kab. Semarang	0	4	0	45
23	Kab. Temanggung	5	4	0	41
24	Kab. Kendal	5	2	0	44
25	Kab. Batang	4	1	0	45
26	Kab. Pekalongan	4	1	0	45
27	Kab. Pemalang	6	2	0	50
28	Kab. Tegal	4	3	0	50
29	Kab. Brebes	3	1	0	50
30	Kota Magelang	0	2	0	25
31	Kota Surakarta	1	1	0	45
32	Kota Salatiga	1	0	0	25
33	Kota Semarang	0	0	0	50
34	Kota Pekalongan	4	1	0	29
35	Kota Tegal	1	2	0	30
Provinsi Jawa Tengah		8	0	0	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin, 2018

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	42	7	49	14,29
2	Kab. Banyumas	41	9	50	18,00
3	Kab. Purbalingga	31	14	45	31,11
4	Kab. Banjarnegara	37	8	45	17,78
5	Kab. Kebumen	38	12	50	24,00
6	Kab. Purworejo	36	10	46	21,74
7	Kab. Wonosobo	42	3	45	6,67
8	Kab. Magelang	42	8	50	16,00
9	Kab. Boyolali	40	5	45	11,11
10	Kab. Klaten	47	3	50	6,00
11	Kab. Sukoharjo	36	9	45	20,00
12	Kab. Wonogiri	41	4	45	8,89
13	Kab. Karanganyar	32	13	45	28,89
14	Kab. Sragen	41	4	45	8,89
15	Kab. Grobogan	45	5	50	10,00
16	Kab. Blora	38	7	45	15,56
17	Kab. Rembang	35	10	45	22,22
18	Kab. Pati	41	9	50	18,00
19	Kab. Kudus	42	3	45	6,67
20	Kab. Jepara	46	4	50	8,00
21	Kab. Demak	42	8	50	16,00
22	Kab. Semarang	36	9	45	20,00
23	Kab. Temanggung	29	12	41	29,27
24	Kab. Kendal	34	11	45	24,44
25	Kab. Batang	36	9	45	20,00
26	Kab. Pekalongan	29	16	45	35,56
27	Kab. Pemasang	42	8	50	16,00
28	Kab. Tegal	40	10	50	20,00
29	Kab. Brebes	42	8	50	16,00
30	Kota Magelang	20	5	25	20,00
31	Kota Surakarta	36	9	45	20,00
32	Kota Salatiga	19	6	25	24,00
33	Kota Semarang	38	12	50	24,00
34	Kota Pekalongan	31	4	35	11,43
35	Kota Tegal	19	11	30	36,67
	Provinsi Jawa Tengah	78	22	100	22,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 15
Jumlah Total Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ormas/LSM		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	89	91	91
2	Kab. Banyumas	146	154	163
3	Kab. Purbalingga	109	109	111
4	Kab. Banjarnegara	24	28	34
5	Kab. Kebumen	140	155	159
6	Kab. Purworejo	206	210	205
7	Kab. Wonosobo	99	152	152
8	Kab. Magelang	88	85	116
9	Kab. Boyolali	22	20	21
10	Kab. Klaten	149	157	160
11	Kab. Sukoharjo	18	21	22
12	Kab. Wonogiri	27	36	44
13	Kab. Karanganyar	171	256	267
14	Kab. Sragen	306	314	321
15	Kab. Grobogan	165	168	174
16	Kab. Blora	26	35	36
17	Kab. Rembang	108	119	127
18	Kab. Pati	82	93	113
19	Kab. Kudus	204	212	216
20	Kab. Jepara	237	224	267
21	Kab. Demak	112	143	96
22	Kab. Semarang	13	6	11
23	Kab. Temanggung	107	122	127
24	Kab. Kendal	220	220	214
25	Kab. Batang	122	122	122
26	Kab. Pekalongan	119	122	124
27	Kab. Pemalang	140	140	146
28	Kab. Tegal	121	124	126
29	Kab. Brebes	324	330	348
30	Kota Magelang	143	142	145
31	Kota Surakarta	12	49	49
32	Kota Salatiga	99	120	129
33	Kota Semarang	211	281	300
34	Kota Pekalongan	43	51	61
35	Kota Tegal	179	183	187
Provinsi Jawa Tengah		4 381	4 794	4 984

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten/Kota dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Tabel 16
Jumlah Peraturan Daerah Eksekutif (Perda) yang Dihasilkan
DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah		
		2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	16	22	20
2	Kab. Banyumas	22	8	11
3	Kab. Purbalingga	14	18	28
4	Kab. Banjarnegara	28	27	20
5	Kab. Kebumen	10	20	11
6	Kab. Purworejo	25	6	25
7	Kab. Wonosobo	13	15	n.a
8	Kab. Magelang	21	21	12
9	Kab. Boyolali	22	20	21
10	Kab. Klaten	19	11	28
11	Kab. Sukoharjo	18	10	10
12	Kab. Wonogiri	23	8	13
13	Kab. Karanganyar	2	11	13
14	Kab. Sragen	12	10	11
15	Kab. Grobogan	20	12	12
16	Kab. Blora	13	25	24
17	Kab. Rembang	9	12	5
18	Kab. Pati	13	12	17
19	Kab. Kudus	4	4	3
20	Kab. Jepara	15	16	13
21	Kab. Demak	11	5	17
22	Kab. Semarang	28	14	16
23	Kab. Temanggung	18	7	15
24	Kab. Kendal	7	13	7
25	Kab. Batang	22	13	n.a
26	Kab. Pekalongan	7	21	15
27	Kab. Pemasang	10	18	18
28	Kab. Tegal	12	13	8
29	Kab. Brebes	9	10	10
30	Kota Magelang	14	13	18
31	Kota Surakarta	20	22	n.a
32	Kota Salatiga	8	8	7
33	Kota Semarang	19	12	17
34	Kota Pekalongan	9	10	8
35	Kota Tegal	12	4	12
	Provinsi Jawa Tengah	6	8	6

Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah
 Keterangan: n.a = data tidak tersedia

Tabel 17
Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) yang Dihasilkan
DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa)		
		2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	2	3	2
2	Kab. Banyumas	10	3	3
3	Kab. Purbalingga	5	5	5
4	Kab. Banjarnegara	5	6	7
5	Kab. Kebumen	0	0	0
6	Kab. Purworejo	4	6	12
7	Kab. Wonosobo	2	3	n.a
8	Kab. Magelang	3	3	0
9	Kab. Boyolali	5	7	8
10	Kab. Klaten	2	4	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	7	5	5
13	Kab. Karanganyar	2	2	2
14	Kab. Sragen	5	7	4
15	Kab. Grobogan	2	0	0
16	Kab. Blora	3	3	7
17	Kab. Rembang	0	2	2
18	Kab. Pati	5	12	5
19	Kab. Kudus	3	0	0
20	Kab. Jepara	0	0	0
21	Kab. Demak	1	1	6
22	Kab. Semarang	0	0	0
23	Kab. Temanggung	4	3	3
24	Kab. Kendal	5	5	3
25	Kab. Batang	4	4	n.a
26	Kab. Pekalongan	2	2	5
27	Kab. Pemalang	2	5	3
28	Kab. Tegal	0	9	5
29	Kab. Brebes	0	1	1
30	Kota Magelang	1	1	2
31	Kota Surakarta	1	3	n.a
32	Kota Salatiga	4	4	4
33	Kota Semarang	45	4	7
34	Kota Pekalongan	7	3	8
35	Kota Tegal	0	0	0
	Provinsi Jawa Tengah	4	4	8

Sumber: Biro Hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

Tabel 18
Jumlah Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta Menurut Kabupaten/Kota,
2017 – 2018

No	Kabupaten/Kota	Polres/Polresta		Polsek/Polsekta	
		2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1	1	22	24
2	Kab. Banyumas	1	1	27	27
3	Kab. Purbalingga	1	1	16	16
4	Kab. Banjarnegara	1	1	20	20
5	Kab. Kebumen	1	1	26	26
6	Kab. Purworejo	1	1	16	16
7	Kab. Wonosobo	1	1	14	14
8	Kab. Magelang	1	1	20	20
9	Kab. Boyolali	1	1	19	19
10	Kab. Klaten	1	1	24	24
11	Kab. Sukoharjo	1	1	12	12
12	Kab. Wonogiri	1	1	25	25
13	Kab. Karanganyar	1	1	17	17
14	Kab. Sragen	1	1	20	20
15	Kab. Grobogan	1	1	19	19
16	Kab. Blora	1	1	16	16
17	Kab. Rembang	1	1	14	14
18	Kab. Pati	1	1	20	20
19	Kab. Kudus	1	1	9	9
20	Kab. Jepara	1	1	16	16
21	Kab. Demak	1	1	14	14
22	Kab. Semarang	1	1	16	16
23	Kab. Temanggung	1	1	14	14
24	Kab. Kendal	1	1	17	17
25	Kab. Batang	1	1	12	12
26	Kab. Pekalongan	1	1	15	15
27	Kab. Pemalang	1	1	14	14
28	Kab. Tegal	1	1	18	18
29	Kab. Brebes	1	1	17	17
30	Kota Magelang	1	1	4	4
31	Kota Surakarta	1	1	5	5
32	Kota Salatiga	1	1	4	4
33	Kota Semarang	1	1	17	17
34	Kota Pekalongan	1	1	6	6
35	Kota Tegal	1	1	4	4
	Polda Jawa Tengah	35	35	549	551

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Tabel 19
Jumlah Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000
Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya
Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah, 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Tindak Pidana	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	394	1,20
2	Kab. Banyumas	895	2,60
3	Kab. Purbalingga	193	0,60
4	Kab. Banjarnegara	183	0,50
5	Kab. Kebumen	256	0,70
6	Kab. Purworejo	159	0,50
7	Kab. Wonosobo	130	0,40
8	Kab. Magelang	391	1,10
9	Kab. Boyolali	292	0,90
10	Kab. Klaten	316	0,90
11	Kab. Sukoharjo	233	0,70
12	Kab. Wonogiri	171	0,50
13	Kab. Karanganyar	219	0,60
14	Kab. Sragen	344	1,00
15	Kab. Grobogan	193	0,60
16	Kab. Blora	127	0,40
17	Kab. Rembang	131	0,40
18	Kab. Pati	342	1,00
19	Kab. Kudus	256	0,70
20	Kab. Jepara	252	0,70
21	Kab. Demak	124	0,40
22	Kab. Semarang	278	0,80
23	Kab. Temanggung	145	0,40
24	Kab. Kendal	140	0,40
25	Kab. Batang	189	0,60
26	Kab. Pekalongan	210	0,60
27	Kab. Pemalang	216	0,60
28	Kab. Tegal	209	0,60
29	Kab. Brebes	125	0,40
30	Kota Magelang	144	0,40
31	Kota Surakarta	914	2,70
32	Kota Salatiga	246	0,70
33	Kota Semarang	1 027	3,00
34	Kota Pekalongan	217	0,60
35	Kota Tegal	173	0,50
	Polda Jawa Tengah	9 834	28,70

Sumber: Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah

Tabel 19 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	84%	10:14:01 PM
2	Kab. Banyumas	51%	9:47:16 AM
3	Kab. Purbalingga	77%	9:23:19 PM
4	Kab. Banjarnegara	78%	11:52:08 PM
5	Kab. Kebumen	96%	10:13:08 AM
6	Kab. Purworejo	94%	7:05:40 AM
7	Kab. Wonosobo	84%	7:23:05 PM
8	Kab. Magelang	66%	10:24:15 PM
9	Kab. Boyolali	63%	6:00:00 AM
10	Kab. Klaten	76%	3:42:17 AM
11	Kab. Sukoharjo	69%	1:35:48 PM
12	Kab. Wonogiri	73%	3:13:41 AM
13	Kab. Karanganyar	79%	4:00:00 PM
14	Kab. Sragen	68%	1:27:54 AM
15	Kab. Grobogan	86%	9:23:19 PM
16	Kab. Blora	86%	8:58:35 PM
17	Kab. Rembang	100%	6:52:13 PM
18	Kab. Pati	69%	1:36:51 AM
19	Kab. Kudus	75%	10:13:05 AM
20	Kab. Jepara	62%	10:45:43 AM
21	Kab. Demak	72%	10:38:43 PM
22	Kab. Semarang	69%	7:30:39 AM
23	Kab. Temanggung	86%	12:24:50 PM
24	Kab. Kendal	104%	2:34:17 PM
25	Kab. Batang	77%	10:20:57 PM
26	Kab. Pekalongan	81%	5:42:51 PM
27	Kab. Pemalang	81%	4:33:20 PM
28	Kab. Tegal	77%	5:54:50 PM
29	Kab. Brebes	72%	10:04:48 PM
30	Kota Magelang	74%	12:50:00 PM
31	Kota Surakarta	85%	9:35:03 AM
32	Kota Salatiga	83%	11:36:35 AM
33	Kota Semarang	66%	8:31:47 AM
34	Kota Pekalongan	69%	4:22:07 PM
35	Kota Tegal	60%	2:38:09 AM
	Polda Jawa Tengah	74%	11:32:17 PM

Sumber: Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah

Tabel 20.
Banyaknya Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)
Menurut Kabupaten/Kota, 2016 – 2018

No	Kabupaten/Kota	2016^r	2017^r	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	283	369	394
2	Kab. Banyumas	521	599	895
3	Kab. Purbalingga	307	212	193
4	Kab. Banjarnegara	259	255	183
5	Kab. Kebumen	333	385	256
6	Kab. Purworejo	219	180	159
7	Kab. Wonosobo	184	142	130
8	Kab. Magelang	282	331	391
9	Kab. Boyolali	262	223	292
10	Kab. Klaten	588	473	316
11	Kab. Sukoharjo	379	300	233
12	Kab. Wonogiri	173	219	171
13	Kab. Karanganyar	239	249	219
14	Kab. Sragen	291	276	344
15	Kab. Grobogan	258	251	193
16	Kab. Blora	236	199	127
17	Kab. Rembang	219	163	131
18	Kab. Pati	388	392	342
19	Kab. Kudus	333	288	256
20	Kab. Jepara	798	442	252
21	Kab. Demak	237	243	124
22	Kab. Semarang	445	310	278
23	Kab. Temanggung	268	249	145
24	Kab. Kendal	263	208	140
25	Kab. Batang	218	211	189
26	Kab. Pekalongan	179	246	210
27	Kab. Pemalang	378	254	216
28	Kab. Tegal	234	207	209
29	Kab. Brebes	118	165	125
30	Kota Magelang	166	164	144
31	Kota Surakarta	1 485	1 170	914
32	Kota Salatiga	317	294	246
33	Kota Semarang	2 112	1 347	1 027
34	Kota Pekalongan	254	207	217
35	Kota Tegal	199	197	173
	Polda Jawa Tengah	13 425	11 420	9 834

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

r) revisi

Tabel 21
Banyaknya Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)
Menurut Kabupaten/Kota, 2016– 2018

No	Kabupaten/Kota	2016 ^r	2017 ^r	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	342	317	329
2	Kab. Banyumas	310	377	457
3	Kab. Purbalingga	229	157	148
4	Kab. Banjarnegara	131	173	142
5	Kab. Kebumen	169	289	245
6	Kab. Purworejo	198	173	149
7	Kab. Wonosobo	159	122	109
8	Kab. Magelang	193	242	259
9	Kab. Boyolali	198	207	183
10	Kab. Klaten	424	345	241
11	Kab. Sukoharjo	278	183	160
12	Kab. Wonogiri	135	158	125
13	Kab. Karanganyar	209	214	173
14	Kab. Sragen	199	210	234
15	Kab. Grobogan	177	186	166
16	Kab. Blora	224	177	109
17	Kab. Rembang	175	152	131
18	Kab. Pati	280	286	235
19	Kab. Kudus	181	213	192
20	Kab. Jepara	397	332	157
21	Kab. Demak	174	175	89
22	Kab. Semarang	319	211	192
23	Kab. Temanggung	211	207	125
24	Kab. Kendal	207	181	146
25	Kab. Batang	181	190	146
26	Kab. Pekalongan	155	207	170
27	Kab. Pemalang	291	221	174
28	Kab. Tegal	168	161	160
29	Kab. Brebes	84	124	90
30	Kota Magelang	118	121	106
31	Kota Surakarta	1 013	959	775
32	Kota Salatiga	240	229	205
33	Kota Semarang	990	727	675
34	Kota Pekalongan	180	153	150
35	Kota Tegal	137	130	104
	Polda Jawa Tengah	9 176	8 510	7 251

Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Tengah

r) revisi

Tabel 22
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, 2016 -2018

No	Kabupaten/Kota	Pembunuhan			Penganiayaan Berat (Anirat)		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kab. Cilacap	1	n.a	0	1	5	5
2	Kab. Banyumas	4	1	0	11	5	12
3	Kab. Purbalingga	1	1	0	3	2	0
4	Kab. Banjarnegara	0	1	0	1	0	1
5	Kab. Kebumen	2	4	1	3	11	10
6	Kab. Purworejo	0	1	1	1	2	6
7	Kab. Wonosobo	n.a	1	1	n.a	n.a	1
8	Kab. Magelang	0	2	1	26	15	9
9	Kab. Boyolali	n.a	n.a	2	12	9	14
10	Kab. Klaten	2	0	1	21	1	1
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0	2	0	1
12	Kab. Wonogiri	3	n.a	0	n.a	n.a	0
13	Kab. Karanganyar	0	0	0	5	14	19
14	Kab. Sragen	1	n.a	0	n.a	1	0
15	Kab. Grobogan	0	1	0	3	2	10
16	Kab. Blora	1	1	0	1	n.a	0
17	Kab. Rembang	2	1	3	2	0	0
18	Kab. Pati	3	n.a	0	n.a	1	2
19	Kab. Kudus	2	1	1	3	0	1
20	Kab. Jepara	1	0	0	0	1	0
21	Kab. Demak	0	3	5	1	2	0
22	Kab. Semarang	n.a	1	2	n.a	n.a	1
23	Kab. Temanggung	0	3	1	0	1	0
24	Kab. Kendal	1	2	2	10	9	0
25	Kab. Batang	2	5	1	20	0	0
26	Kab. Pekalongan	1	2	0	2	3	2
27	Kab. Pemasang	1	2	0	0	2	0
28	Kab. Tegal	2	2	2	1	7	10
29	Kab. Brebes	1	0	2	0	8	4
30	Kota Magelang	0	0	0	0	2	0
31	Kota Surakarta	0	0	1	55	73	0
32	Kota Salatiga	n.a	n.a	0	7	11	9
33	Kota Semarang	9	3	7	91	47	21
34	Kota Pekalongan	0	0	1	0	4	10
35	Kota Tegal	1	1	1	10	3	8
Polda Jawa Tengah		37	30	36	313	313	145

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Penganiayaan Ringan (Anira)			Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Kab. Cilacap	20	17	13	3	8	0
2	Kab. Banyumas	6	14	12	5	4	9
3	Kab. Purbalingga	7	4	11	2	n.a	0
4	Kab. Banjarnegara	0	2	8	1	2	2
5	Kab. Kebumen	n.a	n.a	2	n.a	3	5
6	Kab. Purworejo	7	17	3	5	4	4
7	Kab. Wonosobo	6	n.a	6	5	17	7
8	Kab. Magelang	0	1	21	4	4	11
9	Kab. Boyolali	2	n.a	0	14	4	5
10	Kab. Klaten	5	16	4	6	5	4
11	Kab. Sukoharjo	0	38	20	8	5	2
12	Kab. Wonogiri	4	7	6	2	8	4
13	Kab. Karanganyar	1	1	0	3	12	0
14	Kab. Sragen	11	7	0	5	4	0
15	Kab. Grobogan	9	1	6	11	7	4
16	Kab. Blora	9	7	6	1	2	1
17	Kab. Rembang	16	2	1	3	3	0
18	Kab. Pati	44	30	2	4	n.a	3
19	Kab. Kudus	19	13	11	6	5	4
20	Kab. Jepara	57	27	22	34	14	8
21	Kab. Demak	8	20	2	15	4	5
22	Kab. Semarang	38	29	21	29	n.a	6
23	Kab. Temanggung	19	2	7	2	1	7
24	Kab. Kendal	n.a	n.a	0	4	8	5
25	Kab. Batang	0	0	7	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	1	6	9	1	1	1
27	Kab. Pemasang	11	6	5	13	4	1
28	Kab. Tegal	n.a	n.a	0	n.a	n.a	1
29	Kab. Brebes	1	2	0	7	2	3
30	Kota Magelang	19	11	6	2	1	0
31	Kota Surakarta	58	25	71	24	10	11
32	Kota Salatiga	2	3	1	8	12	6
33	Kota Semarang	76	20	21	41	15	12
34	Kota Pekalongan	6	2	1	0	1	0
35	Kota Tegal	2	0	0	2	5	5
	Polda Jaea Tengah	544	369	328	266	174	121

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabas dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Penculikan			Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Kab. Cilacap	n.a	n.a	0	6	10	8
2	Kab. Banyumas	1	0	1	24	17	15
3	Kab. Purbalingga	n.a	n.a	0	8	9	5
4	Kab. Banjarnegara	0	1	0	2	11	6
5	Kab. Kebumen	n.a	n.a	0	n.a	7	3
6	Kab. Purworejo	0	0	0	8	4	5
7	Kab. Wonosobo	n.a	n.a	1	6	1	1
8	Kab. Magelang	0	0	1	6	13	12
9	Kab. Boyolali	n.a	n.a	0	11	8	16
10	Kab. Klaten	0	0	0	13	9	2
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0	8	7	4
12	Kab. Wonogiri	n.a	n.a	0	4	4	4
13	Kab. Karanganyar	0	0	0	9	4	5
14	Kab. Sragen	n.a	n.a	0	1	3	2
15	Kab. Grobogan	0	0	0	4	6	7
16	Kab. Blora	n.a	n.a	0	6	7	9
17	Kab. Rembang	0	0	0	7	3	4
18	Kab. Pati	n.a	n.a	0	13	11	8
19	Kab. Kudus	0	0	0	2	6	7
20	Kab. Jepara	0	0	0	14	7	9
21	Kab. Demak	0	0	0	5	13	2
22	Kab. Semarang	n.a	n.a	1	5	5	6
23	Kab. Temanggung	0	0	0	9	3	1
24	Kab. Kendal	n.a	n.a	0	5	3	4
25	Kab. Batang	0	2	0	11	5	6
26	Kab. Pekalongan	0	0	0	5	6	4
27	Kab. Pemasang	0	0	0	5	3	7
28	Kab. Tegal	n.a	n.a	0	5	2	9
29	Kab. Brebes	0	0	0	0	14	7
30	Kota Magelang	0	0	0	4	2	4
31	Kota Surakarta	0	0	0	11	7	6
32	Kota Salatiga	n.a	n.a	0	1	1	5
33	Kota Semarang	0	1	1	43	33	28
34	Kota Pekalongan	1	0	1	7	8	6
35	Kota Tegal	0	0	0	5	5	10
	Polda Jawa Tengah	4	3	7	298	248	246

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)			Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1	Kab. Cilacap	4	27	16	27	28	33
2	Kab. Banyumas	39	30	50	111	134	173
3	Kab. Purbalingga	17	17	3	70	30	29
4	Kab. Banjarnegara	18	19	5	52	59	34
5	Kab. Kebumen	22	17	15	19	72	21
6	Kab. Purworejo	12	14	12	24	19	17
7	Kab. Wonosobo	18	9	10	15	17	7
8	Kab. Magelang	10	44	48	34	42	44
9	Kab. Boyolali	15	10	27	12	13	25
10	Kab. Klaten	9	0	15	32	24	17
11	Kab. Sukoharjo	46	53	31	30	34	22
12	Kab. Wonogiri	8	n.a	6	16	35	14
13	Kab. Karanganyar	21	28	17	15	15	14
14	Kab. Sragen	18	27	29	33	28	38
15	Kab. Grobogan	5	8	7	20	15	10
16	Kab. Blora	3	7	6	3	4	6
17	Kab. Rembang	5	1	4	23	19	11
18	Kab. Pati	24	17	14	33	54	48
19	Kab. Kudus	17	28	17	82	54	38
20	Kab. Jepara	42	15	4	128	73	46
21	Kab. Demak	3	7	0	12	47	6
22	Kab. Semarang	23	65	24	48	65	52
23	Kab. Temanggung	17	7	8	21	23	19
24	Kab. Kendal	17	12	10	24	30	19
25	Kab. Batang	7	7	12	3	47	30
26	Kab. Pekalongan	9	13	8	12	10	15
27	Kab. Pemasang	12	11	7	33	22	27
28	Kab. Tegal	11	9	9	77	57	34
29	Kab. Brebes	0	2	3	2	27	15
30	Kota Magelang	11	30	16	14	14	21
31	Kota Surakarta	115	60	114	94	98	73
32	Kota Salatiga	24	27	27	17	48	67
33	Kota Semarang	151	77	66	512	392	234
34	Kota Pekalongan	24	15	1	18	26	28
35	Kota Tegal	10	13	10	40	27	45
	Polda Jawa Tengah	813	753	680	1 807	1 664	1 096

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)			Pengrusakan/Penghancuran Barang		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Kab. Cilacap	55	91	53	n.a	n.a	0
2	Kab. Banyumas	n.a	135	257	n.a	20	8
3	Kab. Purbalingga	92	60	51	n.a	n.a	2
4	Kab. Banjarnegara	64	55	0	0	2	1
5	Kab. Kebumen	80	69	65	n.a	n.a	2
6	Kab. Purworejo	46	35	41	1	2	0
7	Kab. Wonosobo	13	23	13	1	4	0
8	Kab. Magelang	67	74	59	3	2	6
9	Kab. Boyolali	54	28	0	8	1	3
10	Kab. Klaten	55	51	49	8	5	3
11	Kab. Sukoharjo	84	72	0	5	0	0
12	Kab. Wonogiri	28	44	0	n.a	1	0
13	Kab. Karanganyar	50	32	0	1	0	0
14	Kab. Sragen	49	59	0	1	n.a	2
15	Kab. Grobogan	54	53	0	2	0	0
16	Kab. Blora	36	39	19	n.a	n.a	1
17	Kab. Rembang	35	21	14	1	9	0
18	Kab. Pati	41	62	0	7	5	4
19	Kab. Kudus	47	31	28	0	1	0
20	Kab. Jepara	127	57	48	15	0	2
21	Kab. Demak	29	43	0	0	2	0
22	Kab. Semarang	121	50	0	3	4	0
23	Kab. Temanggung	69	47	0	0	0	0
24	Kab. Kendal	37	38	20	n.a	n.a	2
25	Kab. Batang	58	58	42	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	44	72	0	0	0	0
27	Kab. Pemasang	43	49	0	1	0	0
28	Kab. Tegal	52	46	0	2	n.a	0
29	Kab. Brebes	9	43	0	0	0	0
30	Kota Magelang	26	25	0	3	0	4
31	Kota Surakarta	219	114	78	17	15	7
32	Kota Salatiga	22	51	0	n.a	n.a	0
33	Kota Semarang	336	117	0	8	6	3
34	Kota Pekalongan	52	53	0	1	0	2
35	Kota Tegal	22	28	18	0	1	0
	Polda Jawa Tengah	2 400	2 035	1 875	92	63	61

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Narkotika Dan Psikotropika		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(45)	(46)	(47)
1	Kab. Cilacap	34	33	0
2	Kab. Banyumas	n.a	44	30
3	Kab. Purbalingga	14	n.a	0
4	Kab. Banjarnegara	11	10	15
5	Kab. Kebumen	16	18	23
6	Kab. Purworejo	3	6	10
7	Kab. Wonosobo	22	22	18
8	Kab. Magelang	26	25	18
9	Kab. Boyolali	n.a	n.a	0
10	Kab. Klaten	28	16	0
11	Kab. Sukoharjo	30	0	44
12	Kab. Wonogiri	12	20	21
13	Kab. Karanganyar	28	37	37
14	Kab. Sragen	28	31	42
15	Kab. Grobogan	18	22	20
16	Kab. Blora	17	15	8
17	Kab. Rembang	22	0	0
18	Kab. Pati	25	22	0
19	Kab. Kudus	16	19	20
20	Kab. Jepara	28	n.a	0
21	Kab. Demak	27	37	0
22	Kab. Semarang	n.a	n.a	53
23	Kab. Temanggung	19	23	19
24	Kab. Kendal	14	n.a	0
25	Kab. Batang	0	42	1
26	Kab. Pekalongan	0	0	28
27	Kab. Pemasang	19	14	10
28	Kab. Tegal	13	14	21
29	Kab. Brebes	0	0	24
30	Kota Magelang	20	30	33
31	Kota Surakarta	150	149	104
32	Kota Salatiga	n.a	n.a	0
33	Kota Semarang	12	198	0
34	Kota Pekalongan	34	41	52
35	Kota Tegal	24	27	25
Polda Jawa Tengah		1 044	1 080	1 014

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Penipuan			Penggelapan		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)
1	Kab. Cilacap	28	36	25	5	12	2
2	Kab. Banyumas	30	41	66	30	27	46
3	Kab. Purbalingga	33	23	9	14	13	16
4	Kab. Banjarnegara	26	0	19	13	9	8
5	Kab. Kebumen	38	29	19	16	16	3
6	Kab. Purworejo	10	15	3	19	14	24
7	Kab. Wonosobo	7	12	6	8	n.a	6
8	Kab. Magelang	18	27	18	25	17	12
9	Kab. Boyolali	29	24	36	14	13	6
10	Kab. Klaten	30	6	15	67	3	15
11	Kab. Sukoharjo	0	0	7	0	0	20
12	Kab. Wonogiri	10	12	10	8	10	10
13	Kab. Karanganyar	0	22	18	21	12	8
14	Kab. Sragen	34	18	36	18	8	17
15	Kab. Grobogan	10	11	8	10	8	5
16	Kab. Blora	6	3	9	5	4	2
17	Kab. Rembang	11	18	8	7	4	6
18	Kab. Pati	34	27	20	10	13	6
19	Kab. Kudus	33	11	25	23	18	28
20	Kab. Jepara	49	13	5	118	41	11
21	Kab. Demak	28	25	4	6	13	5
22	Kab. Semarang	68	45	24	51	18	14
23	Kab. Temanggung	21	23	13	5	17	10
24	Kab. Kendal	28	11	8	22	8	6
25	Kab. Batang	0	21	18	7	10	6
26	Kab. Pekalongan	6	20	20	5	5	2
27	Kab. Pemasang	29	17	16	26	16	19
28	Kab. Tegal	9	7	11	2	5	10
29	Kab. Brebes	2	6	5	0	5	8
30	Kota Magelang	19	18	14	18	13	15
31	Kota Surakarta	129	116	85	127	184	41
32	Kota Salatiga	27	12	9	35	42	32
33	Kota Semarang	102	0	59	239	126	113
34	Kota Pekalongan	28	4	11	22	6	26
35	Kota Tegal	21	19	14	13	22	17
Polda Jawa Tengah		1 112	785	627	1 041	726	692

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

Tabel 22 (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Korupsi			Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
		2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018	2016 ^{r)}	2017 ^{r)}	2018
(1)	(2)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)
1	Kab. Cilacap	n.a	n.a	3	110	77	0
2	Kab. Banyumas	1	0	0	156	156	0
3	Kab. Purbalingga	1	n.a	1	n.a	n.a	0
4	Kab. Banjarnegara	2	1	1	47	36	0
5	Kab. Kebumen	n.a	2	2	n.a	n.a	0
6	Kab. Purworejo	1	0	1	145	7	0
7	Kab. Wonosobo	1	1	2	n.a	n.a	0
8	Kab. Magelang	0	0	1	45	93	31
9	Kab. Boyolali	2	2	0	n.a	n.a	0
10	Kab. Klaten	0	7	1	0	0	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	17	0
12	Kab. Wonogiri	1	1	0	n.a	n.a	0
13	Kab. Karanganyar	0	0	0	85	65	0
14	Kab. Sragen	n.a	1	2	100	96	0
15	Kab. Grobogan	0	1	1	73	98	96
16	Kab. Blora	2	n.a	2	n.a	n.a	0
17	Kab. Rembang	0	2	0	1780	0	0
18	Kab. Pati	1	1	2	n.a	n.a	0
19	Kab. Kudus	0	1	1	1	1	0
20	Kab. Jepara	0	3	2	48	30	0
21	Kab. Demak	0	2	0	0	1	0
22	Kab. Semarang	1	1	1	18	36	2
23	Kab. Temanggung	1	2	1	0	0	0
24	Kab. Kendal	2	1	1	38	21	0
25	Kab. Batang	0	0	1	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	1	1	3	0	0	0
27	Kab. Pemasang	1	4	1	0	0	0
28	Kab. Tegal	n.a	1	2	n.a	n.a	0
29	Kab. Brebes	2	2	2	0	0	0
30	Kota Magelang	2	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	27	2	0	156	0	215
32	Kota Salatiga	1	n.a	0	n.a	n.a	0
33	Kota Semarang	2	3	1	0	0	0
34	Kota Pekalongan	1	0	1	0	0	0
35	Kota Tegal	1	0	1	0	0	0
	Polda Jawa Tengah	17	29	28	278	299	247

Sumber: Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda Jawa Tengah

Keterangan: n.a = data tidak tersedia

r) revisi

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 2014. *Hasil Pemilu Tahun 2014 Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: KPU Provinsi Jawa Tengah.
- Perludem – Jurnal Pemilu & Demokrasi April 2016 “Evaluasi Pilkada Serentak 2015”*
- Safa’at, Ali (2011), “*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*” Jakarta: Rajagrafindo.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), “*Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*” Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

<https://jateng.bps.go.id>

Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>

<http://www.banyumaskab.go.id/>

<http://www.dprd.jatengprov.go.id>

<http://www.jatengprov.go.id>

<http://www.karanganyarkab.go.id>

<http://www.kuduskab.go.id/>

<http://www.kpu.go.id/>

<http://www.kpu-jatengprov.go.id/>

<http://www.magelangkab.go.id/>

<http://www.temanggungkab.go.id/>

<http://www.tegalkab.go.id/>

<http://www.tegalkota.go.id/>

<http://www.wikipedia.org>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id